

INDIKATOR

KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA SURAKARTA TAHUN 2022



INDIKATOR

KESEJAHTERAAN RAKYAT
KOTA SURAKARTA
TAHUN

2022



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA SURAKARTA TAHUN 2022

No. Publikasi: 33720.2237

Katalog BPS: 4102004.3372

Ukuran Buku: 18,2 cm x 25,7 cm

Jumlah Halaman: x + 59 halaman

Naskah:

BPS Kota Surakarta

Gambar Kulit oleh:

BPS Kota Surakarta

Diterbitkan oleh:

© BPS Kota Surakarta

Dicetak oleh:

BPS Kota Surakarta

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA SURAKARTA TAHUN 2022

Pengarah dan Penanggung Jawab Umum :

Totok Tavirijanto, S.Si

Penyunting :

Dra. Maria Anna Bernadetta Herminawati, M.M

Penulis :

Wahyu Pamungkasjati Handyaningrum, S.ST

Gambar Kulit :

Rumpaka Sari Rahmani, S.ST

Desain Infografis :

Rumpaka Sari Rahmani, S.ST



KATA PENGANTAR

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Surakarta Tahun 2021 merupakan salah satu publikasi tahunan BPS Kota Surakarta yang menyajikan statistik dan indikator untuk menggambarkan kondisi kesejahteraan rakyat di Kota Surakarta sampai dengan Tahun 2020. Data yang digunakan untuk analisis indikator kesejahteraan rakyat ini bersumber dari hasil Survei Penduduk Antar Sensus Tahun 2015 (SUPAS 2015), Sensus Penduduk Tahun 2020 (SP2020), dan Proyeksi Penduduk Interim 2020 - 2023, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) serta beberapa data dan informasi dari Kementerian/Dinas terkait sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan maupun evaluasi terhadap upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Surakarta.

Dengan diterbitkannya buku ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan. Kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian diharapkan untuk perbaikan kualitas publikasi di masa mendatang. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mewujudkan publikasi ini, disampaikan terima kasih.

Surakarta, 15 Desember 2022
KEPALA BPS KOTA SURAKARTA



Totok Tavirijanto, S.Si

DAFTAR ISI

C O N T E N T

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Bab 1. Kependudukan	3
Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin	3
Kepadatan Penduduk	3
Angka Beban Ketergantungan	6
Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama	7
Penggunaan Alat/Cara KB	8
Bab 2. Kesehatan dan Gizi	11
Derajat dan Status Kesehatan Penduduk	11
Tingkat Imunitas dan Gizi Balita	12
Pemanfaatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14
Bab 3. Pendidikan	17
Angka Melek Huruf (AMH)	18
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	19
Tingkat Pendidikan	20
Tingkat Partisipasi Sekolah	22
Kualitas Pelayanan Pendidikan	23
Angka Putus Sekolah (APtS)	27
Bab 4. Ketenagakerjaan	29
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	30
Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan	31
Jumlah Jam Kerja	32
Upah/Gaji/Pendapatan	33
Bab 5. Taraf dan Pola Konsumsi	37
Pengeluaran Rumah Tangga	38
Konsumsi Energi dan Konsumsi Protein	40
Bab 6. Perumahan dan Lingkungan	41
Kualitas Bangunan Tempat Tinggal	41
Fasilitas Bangunan Tempat Tinggal	44
Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal	47

Bab 7.	Kemiskinan	49
	Perkembangan Kemiskinan	49
Bab 8.	Sosial Lainnya	53
	Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi	53
	Perjalanan Wisata	55
	Tindak Kejahatan	56
	Akses Pengobatan Gratis	57
Daftar Pustaka		59

<https://surakartakota.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1.	Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin di Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021	4
Tabel. 1.2.	5 Kota dengan Kepadatan Penduduk Terbesar di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 - 2021	5
Tabel. 1.3.	Angka Beban Ketergantungan di Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021	6
Tabel. 1.4.	Persentase Wanita Usia 10 Tahun Lebih Pernah Kawin menurut Usia Perkawinan Pertama di Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021	8
Tabel. 1.5.	Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi menurut Alat/Cara KB di Kota Surakarta Tahun 2020 - 2021	9
Tabel. 2.1.	Angka Kesakitan (Morbiditas) di Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021	11
Tabel. 2.2.	Persentase Anak Usia 0 - 23 bulan yang Pernah Disusui dan Lamanya Disusui di Kota Surakarta Tahun 2020 - 2021	12
Tabel. 2.3.	Persentase Anak Usia 0 - 59 bulan yang Pernah Diimunisasi menurut Jenis Imunisasi di Kota Surakarta Tahun 2020 -2021	13
Tabel. 2.4.	Distribusi Presentase Wanita Pernah Kawin Umur 15 - 49 Tahun dan Melahirkan Hidup dalam Dua Tahun Terakhir menurut Penolong Persalinan di Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021	14
Tabel. 2.5.	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut Tempat Berobat di Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021	15
Tabel. 2.6.	Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 Penduduk di Kota Surakarta Tahun 2020 - 2021	16
Tabel. 3.1.	Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang Melek Huruf menurut Kelompok Umur di Kota Surakarta Tahun 2020 - 2021	18

Tabel. 3.2.	Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 tahun ke atas menurut Jenis Kelamin di Kota Surakarta Tahun 2020 - 2021	19
Tabel. 3.3.	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menurut Jenis Kelamin di Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021	20
Tabel. 3.4.	Persentase Penduduk 15 tahun ke atas menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki di Kota Surakarta Tahun 2020 - 2021	21
Tabel. 3.5.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur Usia Sekolah di Kota Surakarta Tahun 2016 - 2020	22
Tabel. 3.6.	Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Tingkat Pendidikan di Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021	23
Tabel. 3.7.	Jumlah Murid - Guru - Sekolah di Kota Surakarta Tahun 2021 - 2022	24
Tabel. 3.8.	Jumlah Mahasiswa - Dosen - Perguruan Tinggi di Kota Surakarta Tahun 2021 - 2022	25
Tabel. 3.9.	Rasio Murid - Guru dan Rasio Guru - Sekolah di Kota Surakarta Tahun 2021 - 2022	26
Tabel. 3.10.	Rasio Mahasiswa - Dosen dan Rasio Dosen - Perguruan Tinggi di Kota Surakarta Tahun 2021 - 2022	27
Tabel. 3.11.	Angka Putus Sekolah (APtS) menurut Kelompok Umur Usia Sekolah di Kota Surakarta Tahun 2020 - 2021	28
Tabel. 4.1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Surakarta Tahun 2018 - 2022	30
Tabel. 4.2.	Komposisi Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Lapangan Usaha di Kota Surakarta Tahun 2019 - 2021	31
Tabel. 4.3.	Komposisi Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Status Pekerjaan Utama di Kota Surakarta Tahun 2020 - 2021	32
Tabel. 4.4.	Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang Bekerja menurut Jumlah Jam kerja Selama Seminggu dan Jenis Kelamin di Kota Surakarta Tahun 2020 - 2021	33
Tabel. 4.5.	Rata-rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih per Bulan Pekerja Informal menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Surakarta Tahun 2019 - 2021	34
Tabel. 4.6.	Rata-rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih per Bulan Pekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Surakarta Tahun 2019 - 2021	35

Tabel. 5.1.	Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan menurut Jenis Pengeluaran di Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021	38
Tabel. 5.2.	Persentase Pengeluaran per Kapita per Bulan menurut Jenis Pengeluaran di Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021	39
Tabel. 5.3.	Distribusi Pengeluaran berdasarkan Kriteria Bank Dunia di Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021	39
Tabel. 5.4.	Rata-rata Konsumsi Energi dan Protein per Kapita per Hari di Kota Surakarta Tahun 2020 - 2021	40
Tabel. 6.1.	Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Atap Terluas di Kota Surakarta Tahun 2021	42
Tabel. 6.2.	Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Dinding Terluas di Kota Surakarta Tahun 2020 - 2021	42
Tabel. 6.3.	Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Lantai Terluas di Kota Surakarta Tahun 2021	43
Tabel. 6.4.	Rata-rata dan Persentase Luas Lantai per Kapita di Kota Surakarta Tahun 2020 - 2021	44
Tabel. 6.5.	Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Akses Air Minum di Kota Surakarta Tahun 2018 - 2021	45
Tabel. 6.6.	Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kota Surakarta Tahun 2020 - 2021	45
Tabel. 6.7.	Persentase Rumah Tangga dengan Pembuangan Akhir Tinja di Kota Surakarta Tahun 2021	46
Tabel. 6.8.	Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Sumber Penerangan Utama di Kota Surakarta Tahun 2020 - 2021	47
Tabel. 6.9.	Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal di Kota Surakarta Tahun 2019 - 2021	48
Tabel. 7.1.	Perkembangan Kemiskinan di Kota Surakarta Tahun 2018 - 2022	50
Tabel. 8.1.	Persentase Penduduk yang Menggunakan Alat Komunikasi dan Informasi di Kota Surakarta Tahun 2020 - 2021	54
Tabel. 8.2.	Persentase Penduduk yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi menurut Jenis Alat Komunikasi dan Informasi di Kota Surakarta Tahun 2021	55
Tabel. 8.3.	Persentase Penduduk yang Melakukan Perjalanan Wisata di Kota Surakarta Tahun 2020 - 2021	56

Tabel. 8.4.	Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan menurut Jenis Kejahatan di Kota Surakarta Tahun 2020 - 2021	57
Tabel. 8.5.	Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan menurut Jenis Perawatan di Kota Surakarta Tahun 2020 - 2021	58

<https://surakartakota.bps.go.id>

INDEKS KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA SURAKARTA

KEPADATAN PENDUDUK

11.361 jiwa/km²

Sumber: Susenas 2021

ANGKA MELEK HURUF

98,69

Sumber: Susenas 2021

TINGKAT PARTISIPASI
ANGKATAN KERJA

68,15

Sumber: Sakernas 2022

TINGKAT PENGANGGURAN
TERBUKA

5,83

Sumber: Sakernas 2022

JUMLAH PENDUDUK
MISKIN

45,94 ribu

Sumber: Susenas 2022

PERSENTASE PENDUDUK
MISKIN (Po)

8,84 %

Sumber: Susenas 2022



BAB 1

KEPENDUDUKAN



Penduduk merupakan unsur utama dari keberadaan suatu negara. Laju pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi secara eksponensial telah menjadi permasalahan yang *urgent* bagi sejumlah negara utamanya negara berkembang. Berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk pengendalian jumlah penduduk diharapkan dapat mengimbangi bahkan mengejar kecepatan tingkat pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, serta kebutuhan terhadap pendidikan, kesehatan, penghidupan, dan kehidupan yang layak.

Lambatnya kecepatan tingkat pemenuhan kebutuhan hidup dapat berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang bisa menghambat bahkan memperlambat pencapaian tingkat kesejahteraan penduduk. Kurangnya ketersediaan kebutuhan pangan dapat menimbulkan dan menyebabkan terjadinya kelaparan, gizi buruk, serta dapat meningkatkan jumlah kematian penduduk. Kurangnya ketersediaan pemukiman yang layak dapat menyebabkan timbulnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh, serta tidak layak akibat sempit dan mahalnya harga jual lahan untuk pemukiman, terutama di wilayah perkotaan. Kurangnya sarana dan prasarana serta fasilitas untuk mengakses dan mendapatkan pendidikan menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Permasalahan lain yang dapat terjadi akibat lambatnya kecepatan tingkat pemenuhan kebutuhan hidup diantaranya adalah rendahnya tingkat kesehatan dan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat serta terjadinya gangguan keamanan yang dapat menyebabkan meningkatnya angka kriminalitas. Sedangkan berlebihnya ketersediaan pemenuhan kebutuhan hidup merupakan cerminan dari hasil kebijakan yang tidak berdasarkan pada data. Oleh karena itu kebijakan pemerintah yang terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus berdasarkan pada data yang relevan dan terevaluasi serta dapat terus digunakan dalam upaya pelaksanaan perbaikan kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kota Surakarta pada Tahun 2021 merupakan hasil Proyeksi Interim Sensus Penduduk Tahun 2020 (SP2020) sebanyak 522,73 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan 0,13 persen dibandingkan Tahun 2020. Laju pertumbuhan penduduk yang cenderung menurun semenjak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk di Kota Surakarta semakin rendah. Pertumbuhan penduduk Kota Surakarta yang semakin rendah ini

menggambarkan bahwa semakin sedikitnya jumlah kelahiran dan migrasi masuk daripada kematian dan migrasi keluar.

Tabel. 1.1. Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin di Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021

Tahun	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
2017 ^{a)}	514,54	0,28	94,77
2018 ^{a)}	515,87	0,26	94,78
2019 ^{a)}	517,05	0,23	94,78
2020 ^{b)}	522,33		
2021 ^{c)}	522,73	0,13	94,38

Sumber : a) Proyeksi Penduduk hasil Survei Penduduk antar Sensus 2015 (SUPAS 2015)

b) Penduduk hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020)

c) Proyeksi Penduduk Interim 2020 - 2023

Pada Tahun 2021 Kota Surakarta memiliki rasio jenis kelamin sebesar 94,38 yang berarti dari 100 jiwa penduduk perempuan terdapat sekitar 94 - 95 jiwa penduduk laki-laki. Rasio jenis kelamin yang semakin menuju ke angka 94 semenjak Tahun 2017 bisa disebabkan oleh angka fertilitas (kelahiran) dan migrasi (perpindahan) masuk perempuan yang tinggi ke Kota Surakarta, serta angka mortalitas (kematian) dan migrasi (perpindahan) keluar laki-laki yang tinggi.

Indikasi lain penyebab tingginya angka mortalitas laki-laki di sepanjang Tahun 2019 - 2021 adalah pandemi Covid-19. Sementara indikasi lain penyebab tingginya angka migrasi keluar adalah karena adanya pengusuran hunian dengan pemberian ganti atas kepemilikan bangunan (karena tanah masih milik PT. KAI) pada Tahun 2020 di jelang pembangunan Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta serta pada Tahun 2021 di jelang pembangunan rel layang joglo.

Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan salah satu permasalahan pokok di bidang kependudukan yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial yang lain seperti kebutuhan dan kondisi lahan serta sarana dan prasarana yang layak dan sehat untuk pemukiman serta hunian, ketersediaan lapangan pekerjaan dengan pendapatan yang layak dan memadai untuk mencukupi biaya hidup keluarga, serta keterjangkauan jarak dan biaya untuk mengakses fasilitas pendidikan maupun

kesehatan, berikut permasalahan-permasalahan sosial lainnya yang bisa jadi akan semakin kompleks di tahun-tahun dan pada masa-masa mendatang. Permasalahan-permasalahan sosial yang terus bermunculan dan tak kunjung didapatkan solusi serta segera teratasi, dikhawatirkan dapat mengerucut pada masalah kemiskinan yang tak kunjung berkurang.

Sampai dengan saat ini kepadatan penduduk masih menjadi pekerjaan rumah di setiap wilayah utamanya wilayah yang berstatus Kota, Ibukota Provinsi, terlebih Ibukota Negara. Kota Surakarta memiliki kepadatan penduduk terbesar di Provinsi Jawa Tengah sepanjang Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 sebesar hampir 3 kali lipat kepadatan penduduk Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi dan lebih dari 10 kali lipat kepadatan penduduk Provinsi Jawa Tengah.

**Tabel. 1.2. 5 Kota dengan Kepadatan Penduduk Terbesar
di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017 - 2021**

Kota / Provinsi	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²) per tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kota Surakarta	11.722	11.762	11.293	11.353	11.361
Kota Magelang	6.704	6.726	7.603	7.567	7.572
Kota Tegal	7.193	7.220	6.298	6.901	6.950
Kota Pekalongan	6.714	6.772	6.787	6.788	6.813
Kota Semarang	4.704	4.780	4.853	4.424	4.432
PROVINSI JAWA TENGAH	1.053	1.060	1.058	915	1.120

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017-2021 (Susenas 2017-2021)

Kota Surakarta yang memiliki total luas wilayah sebesar 44,02 km² memiliki kepadatan penduduk sebesar 11.722 jiwa/ km² pada Tahun 2017 yang naik menjadi sebesar 11.762 jiwa/km² pada Tahun 2018. Hal ini bisa disebabkan karena adanya faktor penarik dari Kota Surakarta seperti semakin mudahnya mengakses jalur transportasi melalui Kota Surakarta yang disebabkan oleh posisi Kota Surakarta yang berada di antara Kota Yogyakarta dan Semarang – Kota Yogyakarta dan Kota Madiun – serta Kota Semarang dan Kota Madiun baik via toll maupun menggunakan jalur kereta (Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Kategori Transportasi dan Perdagangan meningkat sebesar 5,69%), meningkatnya jumlah ketersediaan akomodasi dan makan minum yang layak dan terjangkau serta kekinian yang menyebabkan kebutuhan terhadap jasa perusahaan – pendidikan – kesehatan dan sosial – serta jasa lainnya juga meningkat (Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum meningkat sebesar 4,16% - Kategori Jasa Perusahaan meningkat sebesar 9,06% - Kategori Jasa Pendidikan meningkat sebesar 5,80% - Kategori

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial meningkat sebesar 8,78% - serta Kategori Jasa lainnya meningkat sebesar 7,12%). Semakin meningkatnya kepadatan penduduk di Kota Surakarta pada Tahun 2018 menyebabkan semakin meningkatnya juga pendapatan daerah yang menyebabkan juga meningkatnya konsumsi di bidang administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib kereta (Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib meningkat sebesar 3,02%).

Kepadatan penduduk di Kota Surakarta mengalami penurunan pada Tahun 2019 menjadi sebesar 11.293 jiwa/km² karena adanya proses pengosongan lahan di Ketingan Baru di Kelurahan Jebres dan bantaran Sungai bengawan Solo di Kelurahan Pucang Sawit Kecamatan Jebres. Mulai naik kembalinya kepadatan penduduk sedari Tahun 2020 karena mulai ditempatinya kembali rumah orang tua yang sudah meninggal karena Covid-19 oleh anak-anak beserta dengan keluarganya yang menyebabkan 1 rumah bisa ditinggali oleh lebih dari 1 keluarga. Sementara itu semakin meningkatnya kepadatan penduduk Kota Surakarta di Tahun 2021 karena mulai normal kembalinya aktivitas di Kota Surakarta sehingga hunian kos dan kontrakan mulai terisi kembali meskipun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diberlakukan sebagai pengganti dari PSBB.

Angka Beban Ketergantungan

Angka beban ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk berusia 0 – 14 tahun dengan penduduk berusia 65 tahun lebih terhadap jumlah penduduk berusia 15 – 64 tahun. Angka beban ketergantungan menunjukkan besarnya penduduk usia non produktif yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif utamanya secara ekonomi.

**Tabel. 1.3. Angka Beban Ketergantungan
di Kota Surakarta
Tahun 2017 - 2021**

Tahun	Angka Beban Ketergantungan
(1)	(2)
2017	37,84
2018	37,90
2019	37,82
2020	37,80
2021	37,00

Sumber : BPS, Survei Sosial dan Ekonomi Nasional 2017 - 2021 (Susenas 2017-2021)

Meningkatnya angka beban ketergantungan Kota Surakarta pada Tahun 2018 dibandingkan dengan kondisi di Tahun 2017 mengisyaratkan agar penduduk pada kelompok usia produktif di Kota Surakarta untuk bisa berperan aktif secara ekonomi maupun sosial. Sementara itu mulai menurunnya angka beban ketergantungan Kota Surakarta sedari Tahun 2019 menunjukkan bahwa semakin berkurangnya penduduk berusia kurang dari 15 tahun maupun lebih dari 64 tahun. Indikasi lain adalah semakin bertambahnya penduduk pada usia kelompok umur 15 – 64 tahun di Kota Surakarta sepanjang Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021.

Memiliki mayoritas penduduk pada usia produktif memberikan kesempatan pada Kota Surakarta untuk melakukan pembangunan pada berbagai sisi dan lini, baik secara fisik maupun non fisik untuk meningkatkan perekonomian maupun kapasitas sumber daya manusianya. Memiliki mayoritas penduduk pada usia produktif juga mampu menurunkan angka beban ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk usia produktif, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk utamanya secara ekonomi.

Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama

Salah satu yang dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk pada suatu daerah adalah angka fertilitas (kelahiran) yang lebih tinggi dibandingkan angka mirasi (perpindahan penduduk) keluar maupun angka mortalitas (kematian). Angka fertilitas dipengaruhi oleh usia perkawinan pertama bagi Wanita Usia Subur (WUS). Semakin awal WUS melakukan perkawinan pertama maka akan semakin besar kemungkinan WUS tersebut untuk melahirkan seorang anak dan akan menyebabkan semakin panjang usia reproduksi. Semakin panjang usia reproduksi WUS, maka akan semakin panjang periode untuk memiliki lebih banyak anak.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia minimal untuk menikah yaitu sudah berumur 18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21 – 25 tahun.

Mencermati persentase wanita usia 10 tahun lebih yang pernah kawin menurut usia perkawinan pertama di Kota Surakarta pada tabel di bawah dan mendasarkan syarat usia minimal pernikahan bagi perempuan yang diatur oleh undang-undang maupun menurut BKKBN seperti yang tercantum di atas, maka tampak bahwa semakin kecil persentase perempuan melakukan perkawinan pertama kurang dari usia 16 tahun di Kota Surakarta pada Tahun 2021 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin pahamnya masyarakat utamanya WUS untuk tidak melakukan pernikahan di bawah usia minimal karena edukasi yang terus-menerus disampaikan dan digaungkan dari berbagai pihak.

**Tabel. 1.4. Persentase Wanita Usia 10 Tahun Lebih Pernah Kawin
menurut Usia Perkawinan Pertama
di Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021**

Kelompok Usia Perkawinan Pertama (tahun)	Wanita Usia 10 Tahun Lebih Pernah Kawin (%)				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
≤ 16	5,08	5,43	5,31	5,11	3,51
17 - 18	13,31	10,94	15,37	10,83	12,32
19 – 24	55,25	56,11	49,95	48,57	35,62
≥ 25	26,36	27,52	29,37	35,49	48,55

Sumber : BPS, Survei Sosial dan Ekonomi Nasional 2017-2021 (Susenas 2017-2021)

Meningkatnya persentase wanita usia 10 tahun lebih yang melakukan perkawinan pertama setelah berusia 25 tahun pada Tahun 2021 mengindikasikan bahwa semakin tingginya kesadaran masyarakat utamanya WUS di Kota Surakarta untuk melanjutkan, mengenyam, dan menuntaskan pendidikan yang lebih tinggi ataupun memapankan diri secara psikis, biologis, serta ekonomi/finansial terlebih dahulu sebelum melakukan perkawinan pertama.

Penggunaan Alat/Cara KB

Keluarga Berencana (KB) merupakan program yang telah dicanangkan semenjak Tahun 1950-an oleh pemerintah Indonesia sebagai cara untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kematian ibu, dan menjaga jarak kelahiran antar anak. Program KB dilaksanakan kepada WUS yang kawin dengan menggunakan alat kontrasepsi/KB. Seiring dengan semakin maju dan berkembangnya zaman, penggunaan alat kontrasepsi/KB juga dilakukan kepada pria. Selain itu pilihan metode penggunaan alat kontrasepsi/KB juga semakin beragam sesuai dengan kebutuhan dan kondisi hormonal dari setiap Pasangan Usia Subur (PUS).

Pemilihan alat kontrasepsi/KB dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, keterjangkauan harga, kepraktisan, efisiensi, resiko kegagalan yang minimal, serta kenyamanan bagi penggunaannya. Beberapa alat kontrasepsi/KB memiliki sifat penggunaan jangka pendek seperti pil dan suntik, sedangkan beberapa alat kontrasepsi/KB lainnya memiliki sifat penggunaan jangka panjang seperti IUD.

Tabel. 1.5. Persentase Wanita Usia 15 - 49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi menurut Alat/Cara KB di Kota Surakarta Tahun 2020 - 2021

Alat/Cara KB	Tahun	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Sterilisasi wanita/tubektomi/MOW	12,27	11,83
Sterilisasi pria/vasektomi/MOP	0,61	0,00
IUD/AKDR/Spiral	16,56	22,49
Suntikan	23,31	24,26
Susuk KB/implant	8,6	5,33
Pil	14,11	12,43
Kondom pria/karet KB	11,04	14,20
Intravag/kondom wanita/diafragma	0	8,28
Metode menyusui alami	0,61	0,00
Pantang berkala/kalender	9,2	0,00
Lainnya	3,69	1,18

Sumber : BPS, Survei Sosial dan Ekonomi Nasional 2021 (Susenas 2021)

Pada Tahun 2021 sebesar 24,26% WUS usia 15 - 49 tahun yang berstatus kawin di Kota Surakarta masih memilih menggunakan suntik sebagai alat/cara KB, yang semakin meningkat dibandingkan dengan Tahun 2020 diikuti dengan penggunaan IUD/AKDR/Spiral dan Kondom pria/karet KB. Penurunan persentase menggunakan alat/cara KB dengan Sterilisasi wanita/tubektomi/MOW, Pil, dan Susuk KB/implant mengindikasikan bahwa secara umum ada kekurangnyamanan bagi WUS untuk menggunakannya.

Munculnya persentase penggunaan intravag/kondomwanita/diafragma sebagai alat/cara kontrasepsi menunjukkan bahwa semakin meluasnya informasi dan edukasi kepada WUS dalam variasi jenis serta pilihan terhadap alat/cara KB yang lebih sesuai, nyaman, dan sehat bahkan steril bagi penggunaanya. Dan sudah tidak ada yang menggunakan Sterilisasi pria/vasektomi/MOP, Metode menyusui alami, serta Pantang berkala/kalender sebagai alat/cara KB.

BAB 2

KESEHATAN DAN GIZI



Tingkat kesehatan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia di suatu wilayah. Semakin baik tingkat kesehatan suatu masyarakat pada suatu daerah, maka akan semakin baik dukungan terhadap proses dan dinamika pembangunan di wilayah tersebut, khususnya dalam upaya meningkatkan produktivitas masyarakat itu sendiri. Pemerintah telah mencanangkan dan mengupayakan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam mendapatkan dan memperoleh informasi dengan baik terkait kesehatan; mengakses fasilitas dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau serta berkualitas dan merata bagi seluruh kalangan dan golongan masyarakat; menyediakan dan mendistribusikan tenaga medis yang kompeten secara merata ke seluruh wilayah; meningkatkan sarana serta prasarana kesehatan melalui pembangunan dan pembenahan tata kelola berikut pelayanannya di sejumlah fasilitas kesehatan; serta menyediakan dan mendistribusikan obat-obatan yang aman dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.

Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Keluhan kesehatan yang biasanya dialami oleh masyarakat dan mengindikasikan adanya suatu penyakit seperti panas, batuk, pilek, asma/sesak napas, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dan penyakit lain pada umumnya. Tingkat gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya dapat diukur dari Angka Kesakitan (Morbiditas). Semakin tinggi Angka Kesakitan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut.

**Tabel. 2.1. Angka Kesakitan (Morbiditas)
di Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021**

Rincian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Kesakitan / Morbiditas (%)	10,83	16,62	20,66	18,80	5,06

Sumber : BPS, Survei Sosial dan Ekonomi Nasional 2017-2021 (Susenas 2017-2021)

Angka Kesakitan penduduk Surakarta mengalami variasi kenaikan dan penurunan di sepanjang Tahun 2017 – 2021. Kenaikan Angka Kesakitan pada Tahun 2019 dibandingkan pada Tahun 2018 disebabkan oleh meningkatnya jumlah kasus TB Paru dan DBD *Dengue*. Angka ini juga menunjukkan adanya indikasi mulai berkurangnya pola hidup bersih dan sehat yang diterapkan oleh masyarakat Kota Surakarta dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Mulai Tahun 2020 Angka Kesakitan penduduk Kota Surakarta mengalami penurunan menjadi sebesar 18,80 dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini berarti ada sebesar 18,80 persen penduduk Kota Surakarta yang mengalami tingkat gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Angka Kesakitan ini juga cukup menggambarkan mulai melandainya kasus pandemi Covid-19 pada Bulan Maret 2020.

Semakin turunnya Angka kesakitan penduduk Kota Surakarta menjadi sebesar 5,06 pada Tahun 2021 menunjukkan semakin turunnya kasus pandemi Covid-19. Untuk terus menurunkan kasus pandemi Covid-19, pemerintah Kota Surakarta terus gencar melakukan dan memberikan vaksin gratis kepada masyarakat agar dapat segera beraktivitas kembali dengan normal.

Tingkat Imunitas dan Gizi Balita

Tingkat kesehatan dan tumbuh yang baik pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) ditunjukkan oleh rendahnya tingkat mortalitas pada balita dan dipengaruhi oleh tingkat imunitas serta kecukupan kebutuhan gizi yang baik. Tingkat imunitas yang baik terbentuk dari kecukupan kebutuhan gizi dan pola hidup yang sehat. Kebutuhan gizi pada balita dapat terpenuhi dan tercukupi pertama kali dari pemberian Air Susu Ibu (ASI) semenjak proses kelahiran. Pemenuhan kecukupan ASI yang baik sampai dengan 2 tahun dapat membantu perkembangan otak dan fisik serta meningkatkan imun juga menekan angka kesakitan maupun angka mortalitas pada balita.

Tabel. 2.2. Persentase Anak Usia 0 - 23 bulan yang Pernah Disusui dan Lamanya Disusui di Kota Surakarta Tahun 2020 - 2021

Lama Pemberian ASI (bulan)	Anak Usia 0 - 23 bulan (%)	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
< 6	32,66	20,60
6 - 23	67,34	79,40

Sumber : BPS, Survei Sosial dan Ekonomi Nasional 2020-2021 (Susenas 2020-2021)

Berdasarkan data Susenas Tahun 2020 – 2021 tampak bahwa sebesar 100% anak berusia di bawah dua tahun (baduta) telah disusui secara eksklusif (0 – 6 bulan). Hal ini menunjukkan sudah tingginya kesadaran masyarakat utamanya ibu menyusui di Kota Surakarta terhadap kesehatan dan tumbuh kembang balita. Semakin berkurangnya persentase menyusui anak hingga sebelum berusia 6 bulan dan meningkatnya persentase menyusui hingga anak berusia 23 bulan pada Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun 2020 juga merupakan indikasi hasil dari upaya edukasi dan *sounding* yang terus-menerus agar ibu bisa menyusui bayi hingga usia 2 tahun.

Selain ASI, MP-ASI dapat diberikan kepada balita setelah berusia 6 bulan untuk pengenalan makanan dan meningkatkan imunitas pada balita. Pemberian imunisasi juga perlu dilakukan agar tubuh menjadi resisten atau kebal terhadap penyakit menular sebagai upaya lain dalam meningkatkan imunitas pada balita.

Tabel. 2.3. Persentase Anak Usia 0 - 59 bulan yang Pernah Diimunisasi menurut Jenis Imunisasi di Kota Surakarta Tahun 2020 – 2021

Jenis Imunisasi	Anak Usia 0 - 59 bulan (%)	
	2020	2021
(1)	(2)	(2)
BCG	98,75	95,94
DPT	93,73	92,75
Polio	97,43	95,51
Campak/Morbili	74,94	79,16
Hepatitis B	97,33	94,98

Sumber : BPS, Survei Sosial dan Ekonomi Nasional 2020-2021 (Susenas 2020-2021)

Pencapaian Imunisasi yang tidak sampai dengan 100% di sepanjang Tahun 2020 – 2021 pada setiap jenis imunisasi bisa jadi disebabkan karena orang tua balita tidak tepat jadwal dalam mengimunitaskan putra dan atau putrinya ke fasilitas pelayanan imunisasi terdekat. Perlu adanya sistem jemput bola dari Pemerintah Kota Surakarta sebagai salah satu upaya, minimal untuk mengingatkan orang tua, agar putra dan atau putrinya dapat mendapatkan imunisasi sesuai jadwal dan usia balita. Pemberian imunisasi yang tepat dan sesuai jadwal kepada balita mampu membentuk kekebalan tubuh secara bertahap dan berkelanjutan. Pemberian imunisasi yang gratis dan murah kepada balita juga mendorong masyarakat utamanya ibu untuk bisa lebih aktif mengantarkan anaknya ke posyandu/puskesmas/pelayanan imunisasi terdekat.

Fasilitas kesehatan didirikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Ketersediaan, keberfungsian, serta kemudahan akses dari keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Salah satu tujuan khusus dari mudah diaksesnya keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan adalah untuk menurunkan resiko angka kematian ibu dan bayi selama proses persalinan karena jauhnya jarak ataupun lambatnya pertolongan yang didapatkan untuk membantu persalinan.

Sepanjang Tahun 2017 – 2021, Wanita Pernah Kawin (WPK) di Kota Surakarta yang berusia 15 – 49 tahun dan telah melahirkan hidup dalam dua tahun terakhir, mayoritas telah memilih dokter kandungan dan bidan sebagai penolong persalinannya. Persentase yang telah dibantu oleh dokter kandungan selama proses persalinannya terus meningkat dari Tahun 2017 sebesar 58,76% sampai dengan menjadi sebesar 70,30% pada Tahun 2021. Hal ini terus didukung dengan semakin banyak dan mudahnya praktek dokter kandungan diakses oleh ibu hamil baik secara umum maupun melalui berbagai program jaminan kesehatan (BPJS, KIS, PIB, Jamkesda, dll).

Tabel. 2.4. Distribusi Persentase Wanita Pernah Kawin Umur 15 - 49 Tahun dan Melahirkan Hidup dalam Dua Tahun Terakhir menurut Penolong Persalinan di Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021

Penolong Persalinan	Wanita Pernah Kawin Umur 15 - 49 Tahun dan Melahirkan Hidup dalam 2 tahun Terakhir (%)				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dokter Kandungan	58,76	65,00	66,08	60,17	70,30
Bidan	39,74	35,00	33,92	39,83	29,70
Dukun beranak/paraji	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPS, Survei Sosial dan Ekonomi Nasional 2017-2021 (Susenas 2017-2021)

Beberapa kondisi khusus masih membuat ibu hamil melakukan persalinan dengan dibantu oleh dukun beranak/peraji. Hal ini terakhir tampak pada Tahun 2017 masih ada sebesar 1,50% ibu hamil yang proses persalinannya dibantu oleh dukun beranak/peraji.

Selain bertujuan khusus untuk menurunkan resiko angka kematian ibu dan bayi selama proses persalinan, fasilitas pelayanan kesehatan juga ditujukan untuk melakukan pelayanan secara umum. Beberapa hal lain yang menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk mengakses fasilitas

pelayanan kesehatan adalah kualitas pelayanan serta kemampuan masyarakat untuk menanggung biaya pengobatan berikut jenis pelayanan kesehatannya.

Susenas mencatat secara umum penduduk yang mengalami gangguan/keluhan kesehatan sehingga mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari pada umumnya melakukan rawat atau berobat jalan. Mayoritas penduduk Kota Surakarta ketika mengalami gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari melakukan rawat atau berobat jalan ke Puskesmas/Pustu. Sebesar 30% lebih penduduk di Kota Surakarta melakukan rawat atau berobat jalan di Puskesmas/Pustu di sepanjang Tahun 2017 – 2020 dan mulai menurun pada Tahun 2021.

Tidak adanya penduduk Kota Surakarta yang berobat jalan ke UKBM, Praktik pengobatan tradisional/alternatif, dan Lainnya di Tahun 2021 mengindikasikan bahwa semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan pribadi dan keluarga. Semakin meratanya persentase penduduk Kota Surakarta yang juga berobat jalan di Praktik Dokter/Bidan, RS Swasta, dan Klinik/Praktik dokter bersama selain di Puskesmas/Pustu pada Tahun 2021 mengindikasikan bahwa semakin bervariasi, mudah, dan terjangkau bagi masyarakat Kota Surakarta untuk dapat berobat jalan di berbagai kelas fasilitas kesehatan.

Tabel. 2.5. Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut Tempat Berobat di Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021

Tempat Berobat	Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat (%)				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
RS Pemerintah	8,76	6,43	8,99	8,40	6,66
RS Swasta	14,39	16,64	16,18	18,96	23,37
Praktik dokter/bidan	31,27	21,17	24,72	22,29	24,73
Klinik/Praktik dokter bersama	16,43	18,76	14,02	12,20	21,08
Puskesmas/Pustu	30,59	40,78	40,69	40,12	25,81
UKBM (Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan)	0,56	0,00	0,45	0,29	0,00
Praktik pengobatan tradisional/alternatif	0,61	0,00	0,20	0,83	0,00
Lainnya	1,02	0,34	0,25	0,00	0,00

Sumber : BPS, Survei Sosial dan Ekonomi Nasional 2017-2021 (Susenas 2017-2021)

Sementara itu semakin turunnya persentase penduduk yang berobat jalan ke RS Pemerintah sedari Tahun 2020 mengindikasikan bahwa perlu adanya pembenahan pelayanan baik mutu maupun kemudahan serta kebersihan bagi penduduk yang mengalami gangguan/keluhan kesehatan sehingga mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Hal lain adalah penduduk yang menghindari dan

pembatasan layanan bagi pasien untuk dapat berobat jalan di RS Pemerintah karena telah ditunjuk menjadi RS rujukan bagi penderita Covid-19 selama masa pandemi masih berlangsung.

Fasilitas pelayanan kesehatan selain fisik, juga meliputi keberadaan dan kemampuan tenaga kesehatan yang berada pada suatu daerah terhadap jumlah penduduk pada daerah tersebut. Pada Tahun 2021 di Kota Surakarta terdapat 2.107 orang tenaga kesehatan per 100.000 penduduk yang sudah bertambah mencapai 2 kali lipat dibandingkan pada Tahun 2020 walaupun masih menunjukkan bahwa secara keseluruhan baru ada 1 orang tenaga kesehatan per 100 penduduk di Kota Surakarta.

**Tabel. 2.6. Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 penduduk
di Kota Surakarta
Tahun 2020 - 2021**

Tenaga Kesehatan	Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 penduduk	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Tenaga Kesehatan	0,01230	0,02107
Dokter	0,00080	0,00675
Perawat	0,00776	0,00891
Bidan	0,00125	0,00134
Tenaga Farmasi	0,00154	0,00229
Ahli Gizi	0,00022	0,00026
Tenaga Lainnya	0,00073	0,00153

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2020-2021 (Dinkes Prov. Jateng 2020-2021)

Penambahan tenaga kesehatan yang cukup signifikan adalah dokter dan tenaga kesehatan lainnya (tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, dan ahli teknologi laboratorium medik). Masih minimnya jumlah tenaga kesehatan terlebih spesialis di Kota Surakarta menyebabkan masih panjangnya waktu tunggu bagi seorang pasien untuk melakukan konsultasi di praktek-praktek pelayanan kesehatan. Hal ini juga menyebabkan tingkat penanganan terhadap pasien yang mengalami Covid-19 masih rendah akibat tidak seimbangnya jumlah tenaga kesehatan dengan pasien penderita Covid-19 karena pemberlakuan *shift* pada sistem kerja tenaga kesehatan.

BAB 3

PENDIDIKAN



Pembangunan di bidang pendidikan merupakan investasi dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berperan penting dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan serta pengangguran. Peningkatan kualitas SDM berfungsi untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia, dan menghargai keberagaman sehingga mampu bersaing dalam era global dengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan masyarakat Indonesia dan tanpa diskriminasi (RPJP 2005-2025 www.bappenas.go.id).

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28C, ayat 1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat 2) dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan masyarakat Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Telah dijelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional, Tahun 2003 tersebut tentang posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan, baik dari sisi penyelenggaraan, sarana serta ketersediaan pengajar. UUD1945 juga telah mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia (sekaligus Pemerintah Daerah) wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap-tiap warga negara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan. Pada pasal 49 ayat 1 lebih menjamin alokasi ketersediaan anggaran baik dari APBD maupun APBN dengan bunyi “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.

Mengacu pada pembahasan di atas, hal-hal yang menyangkut dunia pendidikan akan dibahas dalam bab ini. Beberapa indikator yang akan disajikan di dalam publikasi ini yaitu Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Rasio Murid - Guru dan Rasio Guru - Sekolah, serta Angka Putus Sekolah (APtS). Indikator-indikator tersebut diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi

Nasional yang dilakukan BPS dan registrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama.

Angka Melek Huruf (AMH)

Salah satu indikasi dari keberhasilan pendidikan di suatu daerah adalah meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH). Melek huruf merupakan kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis dengan huruf latin atau huruf lainnya dalam kegiatannya. Tingginya AMH menunjukkan tingkat pencapaian pemberantasan buta huruf di daerah tersebut.

Tabel. 3.1. Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang Melek Huruf menurut Kelompok Umur di Kota Surakarta Tahun 2020 - 2021

Kelompok Umur (tahun)	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (%)	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
15 - 19	100,00	100,00
20 - 24	100,00	100,00
25 - 29	100,00	100,00
30 - 34	98,53	100,00
35 - 39	100,00	100,00
40 - 44	100,00	100,00
45 - 49	98,82	100,00
50+	95,83	96,58

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020-2021 (Susenas 2020-2021)

Persentase pada setiap kelompok umur penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Surakarta pada Tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan pada Tahun 2020. Hampir seluruh kelompok umur di Kota Surakarta pada Tahun 2021 sudah 100% melek huruf. Adanya persentase melek huruf yang tidak mencapai 100% berada pada kelompok umur 50+ tahun yang menunjukkan bahwa pada saat 50 tahun yang lalu di Kota Surakarta, masih ada masyarakat yang tidak tamat SD yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, dan hingga saat ini belum atau bahkan tidak berkesempatan untuk menyetarakan pendidikannya sesuai dengan tingkat usia sekolah di masyarakat pada umumnya.

Kenaikan AMH di Kota Surakarta pada Tahun 2021 menjadi 98,69% dari 98,25% pada Tahun 2020 terlihat pada tabel di bawah ini. Secara umum kenaikan AMH Kota Surakarta pada Tahun 2021 juga didasarkan pada kenaikan AMH berdasarkan jenis kelamin. Namun begitu masih tampak bahwa kemampuan literasi perempuan di Kota Surakarta lebih rendah daripada laki-laki dengan AMH perempuan yang hanya sebesar 98,10%, sedangkan laki-laki memiliki AMH sebesar 99,34%.

Tabel. 3.2. Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 tahun ke atas menurut Jenis Kelamin di Kota Surakarta Tahun 2020 - 2021

Jenis Kelamin	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (%)	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
AMH	98,25	98,69
Laki-laki	99,14	99,34
Perempuan	97,44	98,10

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020-2021 (Susenas 2020-2021)

Berdasarkan kedua tabel di atas, maka dapat didapatkan gambaran bahwa pendidikan perempuan di Kota Surakarta pada masa 50 tahun yang lalu belum setara dengan tingkat pendidikan yang dikenyam dan dituntaskan oleh laki-laki. Selain itu, belum 100%-nya AMH di Kota Surakarta pada Tahun 2021 bisa jadi disebabkan karena adanya kesulitan/gangguan fisik maupun psikis seperti kesulitan/gangguan penglihatan, pendengaran, dan perilaku/emosional pada sebagian individu.

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk menggambarkan tingkat kualitas pendidikan masyarakat di suatu daerah diukur dari penduduk berusia 25 tahun ke atas. Pengukuran ini diasumsikan bahwa pada usia tersebut proses belajar pada pendidikan formal telah berakhir. RLS yang mempunyai pengertian jumlah tahun belajar yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).

Berdasarkan data Susenas, RLS Kota Surakarta terus meningkat di sepanjang Tahun 2017 – 2021, dari sebesar 10,38 tahun pada Tahun 2017 hingga menjadi sebesar 11,21 pada Tahun 2021. Hal

ini menunjukkan bahwa secara umum anak-anak usia sekolah di Kota Surakarta di sepanjang Tahun 2017 – 2021 telah mengenyam pendidikan sampai dengan lulus SLPT/ sederajat, sehingga bisa dikatakan bahwa program wajib belajar 9 tahun di Kota Surakarta berhasil.

**Tabel. 3.3. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menurut Jenis Kelamin
Tahun 2017 – 2021**

Jenis Kelamin	Rata-rata Lama Sekolah (RLS (tahun))				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
RLS	10,38	10,53	10,54	10,69	11,21
Laki-laki	10,96	11,09	11,1	11,25	11,50
Perempuan	9,84	10,01	10,09	10,30	10,94

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017-2021 (Susenas 2017-2021)

Meski begitu, RLS Kota Surakarta masih berada pada kisaran angka 11 tahun, sehingga bisa dikatakan bahwa masih ada anak-anak yang putus sekolah pada kelas 2 atau 11 di jenjang pendidikan SLTA/ sederajat, sehingga anak-anak bersekolah tidak sampai tamat pada jenjang pendidikan tersebut. Sementara itu masih selalu nampak bahwa RLS perempuan selalu masih lebih rendah dibandingkan dengan RLS laki-laki di sepanjang Tahun 2017 – 2021. Hal ini mengindikasikan masih adanya bias gender terkait jenjang ataupun lama masa pendidikan yang dapat ditempuh antara laki-laki dengan perempuan pada beberapa rumah tangga. Hal lain adalah masih adanya perempuan yang kawin dan hamil di bawah usia belajar 12 tahun sehingga menyebabkan putus sekolah pada jenjang pendidikan SLTA/ sederajat.

Tingkat Pendidikan

Selain RLS, cara mengukur pencapaian di bidang pendidikan pada suatu daerah adalah berdasarkan persentase Ijazah tertinggi yang dimiliki oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di daerah tersebut. Ukuran ini mampu menggambarkan keberhasilan penerapan program wajib belajar 9 tahun oleh pemerintah.

Secara umum Ijazah tertinggi yang dimiliki oleh penduduk Kota Surakarta adalah SMA/MA/ SMLB/ Paket C pada Tahun 2020 – 2021. Naiknya persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang

berijazah SMA/MA/ SMLB/ Paket C menyebabkan berkurangnya persentase pada kelompok yang berijazah SMK/MAK.

Mulai naiknya persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah Diploma IV/ S1/S2/S3 pada Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun 2020 telah menyebabkan berkurangnya persentase pada kelompok penduduk usia 15 tahun ke atas dengan ijazah D I / D II / Akademi/ D III. Namun begitu masih perlu dorongan bagi penduduk usia 15 tahun ke atas agar tetap terus melanjutkan dan menuntaskan pendidikan ke Perguruan Tinggi.

**Tabel. 3.4. Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke Atas
menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki
di Kota Surakarta
Tahun 2020 – 2021**

Ijazah Tertinggi yang Dimiliki	Penduduk Usia 15 tahun ke Atas (%)	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Tidak punya ijazah	6,36	4,23
SD/MI/ SDLB/ Paket A	15,51	13,55
SMP/MTs/ SMPLB/ Paket B	18,60	18,56
SMA/MA/ SMLB/ Paket C	32,99	36,16
SMK/MAK	9,30	8,12
D I / D II / Akademi/ D III	6,21	5,81
Diploma IV/ S1/S2/S3	11,03	13,57

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020-2021 (Susenas 2020-2021)

Pada tahun 2021, penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Surakarta yang ijazah tertingginya SMP/MTs/ SMPLB/ Paket B dan SD/MI/ SDLB/ Paket A, masih memiliki persentase lebih dari 10%, meskipun persentasenya sudah lebih rendah dibandingkan pada Tahun 2020. Dorongan dari berbagai pihak terkait masih terus diperlukan untuk dapat melanjutkan dan mengentaskan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

Masih adanya penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Surakarta sampai dengan Tahun 2021 yang tidak memiliki ijazah menjadi cambuk bagi seluruh pihak terkait agar tetap terus berupaya meningkatkan jenjang pendidikan yang ditamatkan serta mengupayakan kepemilikan pekerjaan ataupun pemberian bantuan yang dapat digunakan untuk membiayai hidup secara layak di Kota Surakarta.

Tingkat pencapaian pembangunan di bidang pendidikan juga dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Sekolah. Tingkat partisipasi sekolah dapat digunakan untuk mengukur partisipasi masyarakat pada berbagai kelompok umur dan jenjang pendidikan serta untuk memperhitungkan pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C).

Tingkat partisipasi sekolah yang digunakan untuk pengukuran adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APS menunjukkan banyaknya penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu yang masih sekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi), terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu tersebut. Sedangkan APM menunjukkan banyaknya penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang menempuh jenjang pendidikan pada usia sekolah yang bersesuaian, terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu tersebut.

Tabel. 3.5. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur Usia Sekolah di Kota Surakarta Tahun 2017 – 2021

Kelompok Umur Usia Sekolah (tahun)	Angka Partisipasi Sekolah (%)				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7 - 12	99,15	99,75	99,88	99,49	99,50
13 - 15	97,83	98,59	98,85	100,00	99,96
16 - 18	81,28	76,92	75,80	76,25	75,67

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017-2021 (Susenas 2017-2021)

APS penduduk Kota Surakarta usia sekolah 7 – 15 tahun telah mencapai lebih dari 99% di sepanjang Tahun 2017 - 2021, dan masih ada sekitar 0,85% - 0,04% yang belum atau tidak sekolah. Pada Tahun 2020 APS penduduk Kota Surakarta usia sekolah 13 – 15 tahun mencapai 100% yang berarti bahwa tidak ada anak berumur 13 – 15 tahun di Kota Surakarta pada Tahun 2020 yang tidak bersekolah dan atau bahkan putus sekolah.

Sementara itu APS pada kelompok umur usia sekolah 16 – 18 tahun mengalami penurunan pada Tahun 2018 - 2019 dan Tahun 2021. Masih kurangnya tingkat partisipasi sekolah pada kelompok umur 16 – 18 tahun seringkali dikarenakan kemampuan ekonomi orang tua dan juga lingkungan sosial yang menyebabkan anak-anak tidak melanjutkan sekolah (putus sekolah).

Berdasarkan APM pada jenjang pendidikan SD/MI, telah tercapai sebesar 99,23% pada Tahun 2021 setelah mengalami penurunan pada Tahun 2019. Hal ini berarti bahwa sudah sebesar 99% lebih

anak-anak di Kota Surakarta yang berusia 7 – 12 tahun yang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Tabel. 3.6. Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Tingkat Pendidikan di Kota Surakarta Tahun 2017 – 2021

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (%)				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD/MI	98,91	99,22	99,19	99,20	99,23
SMP/MTs	81,25	79,34	80,60	82,58	83,49
SMA/SMK/MA	65,41	65,26	66,12	67,88	67,21

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017-2021 (Susenas 2017-2021)

Pada APM jenjang pendidikan SMP/MTs di Tahun 2021 sudah mencapai 83,49%, meski masih jauh dari angka 90%. Hal ini mengindikasikan bahwa masih ada sekitar 16,51% anak usia 13 – 15 tahun di Kota Surakarta yang bersekolah kurang atau lebih dari SMP/MTs sampai dengan akhir Tahun 2021.

APM pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA di Kota Surakarta yang masih kurang dari 70% di sepanjang Tahun 2017 – 2021 selayaknya masih harus terus menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Surakarta. Karena selain kurang tepatnya anak usia 16 – 18 tahun yang bersekolah di luar jenjang pendidikan SMA/SMK/MA, masih rendahnya APM di jenjang pendidikan ini juga mengindikasikan adanya jumlah anak-anak yang putus sekolah pada usia 16 – 18 tahun. Hal lain yang bisa menyebabkan APM belum mencapai 100% adalah pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang kurang merata, penerapan sistem zonasi yang terkesan membatasi anak usia sekolah untuk bisa bersekolah di sekolah yang diinginkan sementara lokasi hunian di luar zonasi dari sekolah yang diinginkan, serta adanya sistem *home schooling* yang belum termasuk dalam klasifikasi pendidikan formal maupun pendidikan non formal (masih belum tercatat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ataupun Lembaga/Dinas/Instansi lainnya).

Kualitas Pelayanan Pendidikan

Dalam rangka mencerdaskan bangsa, peningkatan mutu dan layanan pendidikan menjadi program utama pemerintah untuk mempersiapkan SDM yang berkualitas. Keseimbangan jumlah pelajar

– jumlah pengajar – dan jumlah tempat penyelenggaraan pendidikan diharapkan mampu mendorong meningkatnya kualitas layanan pendidikan.

Pada Tahun 2022, jumlah murid di jenjang pendidikan SMP/MTs sampai dengan SMA/ SMK/MA di Kota Surakarta mengalami pertambahan dibandingkan Tahun 2021. Sementara jumlah murid di jenjang pendidikan TK/RA sampai dengan SD/MI mengalami penurunan.

**Tabel. 3.7. Jumlah Murid - Guru - Sekolah
di Kota Surakarta Tahun 2021 - 2022**

Jenjang Pendidikan	Jumlah					
	2021			2022		
	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
TK/RA	15.131	1.194	317	13.112	1.602	301
SD/MI	61.976	4.005	257	59.455	5.794	430
SMP/MTs	33.942	2.418	81	33.859	3.473	402
SMA/SMK/MA	20.992	1.517	39	20.999	1.857	306

Sumber : Kemendikbud dan Kemenag Kota Surakarta

Dari segi jumlah guru ada penambahan di seluruh jenjang pendidikan. Sedangkan dari segi jumlah sekolah, ada pengurangan di jenjang pendidikan TK/RA, namun ada penambahan di jenjang pendidikan SD/MI sampai dengan SMA/MK/MA.

Penurunan jumlah murid TK/RA di Tahun 2022 bisa disebabkan oleh masih berlangsungnya metode pembelajaran secara dalam jaringan (daring) selama masa pandemi sehingga adanya pertimbangan dari orang tua untuk melakukan penghematan ekonomi pada pengeluaran di bidang pendidikan. Sementara itu penurunan jumlah murid di jenjang pendidikan SD/MI bisa disebabkan oleh penerapan sistem zonasi yang lebih tepat dan atau juga karena seiring dengan terus menurunnya laju pertumbuhan penduduk di Kota Surakarta.

Bertambahnya jumlah guru di seluruh jenjang pendidikan menunjukkan adanya upaya untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan sedari dini sampai dengan tuntasnya program wajib belajar 9 tahun bahkan wajib belajar 12 tahun. Penambahan jumlah guru dan sekolah mengindikasikan bahwa pendidikan telah menjadi perhatian bagi seluruh pihak terkait serta diharapkan dapat mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan rata-rata lama sekolah di Kota Surakarta.

Pada tingkat Perguruan Tinggi (PT), tampak meningkatnya jumlah mahasiswa dan dosen pada Tahun 2022 meskipun jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) berkurang 5. Berkurangnya PTS di Kota Surakarta tidak mengurangi jumlah mahasiswa dan dosen di Kota Surakarta karena ada yang di-merger/gabung dan ada sejumlah PT yang membuka jurusan baru.

**Tabel. 3.8. Jumlah Mahasiswa - Dosen - Perguruan Tinggi
di Kota Surakarta Tahun 2021 – 2022**

Jenjang Pendidikan	Jumlah					
	2021			2022		
	Mahasiswa	Dosen	PT	Mahasiswa	Dosen	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PT	97.891	4.092	45	102.186	4.174	40

Sumber : Kemenristek, Kemendikbud, & Kemenag Kota Surakarta

Adanya penambahan dan pengurangan jumlah sekolah di beberapa jenjang pendidikan pada Tahun 2022 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta terus melakukan pembenahan di bidang pendidikan dengan melihat jumlah anak usia sekolah berdasarkan komposisi umur penduduk maupun prestasi dan golongan sosial serta ekonominya, lokasi sekolah berdasarkan jarak dari lokasi hunian dan atau pemukiman, serta distribusi dan kebutuhan jumlah guru berdasarkan jumlah murid di setiap sekolah yang akan diajar. Saat ini jumlah murid, guru, dan sekolah telah menjadi perhatian di dalam bidang pendidikan untuk penetapan jarak zonasi berdasarkan alokasi dan lokasi dari ketiga komponen tersebut yang dinyatakan dengan rasio murid - guru dan rasio guru - sekolah.

Rasio murid-guru merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan pendidikan. Indikator ini tidak memperhitungkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas belajar/mengajar, seperti perbedaan dalam kualifikasi guru, pelatihan pedagogi, pengalaman dan status, metode pengajaran, kondisi bahan ajar dan variasi di dalam kelas.

Rasio murid-guru merupakan perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan. Rasio murid-guru ini digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah murid yang dilayani oleh satu orang guru di suatu sekolah atau daerah tertentu.

Rasio antara murid dengan guru dapat memberikan gambaran mengenai besarnya beban kerja guru dalam mengajar. Semakin tinggi nilai rasionya, mampu menyebabkan semakin berkurangnya pengawasan/perhatian guru terhadap murid sehingga kualitas pengajaran akan cenderung semakin rendah. Dengan demikian, semakin banyak murid yang menjadi tanggung jawab seorang guru akan mengurangi daya tangkap murid pada pelajaran yang diberikan atau mengurangi efektivitas pengajaran.

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyebutkan bahwa pada jenjang SD, SMP, dan SMA idealnya 1 guru bertanggungjawab terhadap 20 murid. Sedangkan, pada jenjang TK/RA, MI, MTs, MA dan SMK atau yang sederajat idealnya 1 guru bertanggungjawab pada 15 murid. Sementara itu, rasio jumlah guru dengan peserta didik pada tingkat MAK adalah 1 : 12 (1 guru berbanding 15 peserta didik). Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara ideal 1 guru bertanggungjawab terhadap 12 – 20 murid.

Secara umum rasio murid - guru di Kota Surakarta pada Tahun 2021 sudah ideal pada setiap jenjang pendidikan. Dan rasio murid – guru Kota Surakarta pada Tahun 2022 lebih baik dibandingkan dengan rasio murid guru pada Tahun 2021.

Sudah turunnya rasio murid - guru pada jenjang pendidikan TK/RA dan SMP/MTs di bawah 2 digit menunjukkan bahwa sudah mulai *concern*-nya seluruh pihak terkait terhadap pendidikan utamanya kepada pendidik dan siswanya. Sementara itu, meskipun rasio murid - guru pada jenjang pendidikan SD/MI serta SMA/SMK/MA pada Tahun 2022 masih di atas 2 digit, masih dapat dikatakan ideal sehingga pembenahan-pembenahan yang lebih lanjut di masa-masa mendatang masih dapat terus dilakukan.

**Tabel. 3.9. Rasio Murid - Guru dan Rasio Guru - Sekolah
Kota Surakarta Tahun 2021 - 2022**

Jenjang Pendidikan	Rasio			
	2021		2022	
	Murid - Guru	Guru - Sekolah	Murid - Guru	Guru - Sekolah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TK/RA	12,67	3,77	8,18	5,32
SD/MI	15,47	15,58	10,26	13,47
SMP/MTs	14,04	29,85	9,75	8,64
SMA/SMK/MA	13,84	38,90	11,31	6,07

Sumber : Kemendikbud dan Kemenag Kota Surakarta

Selain rasio murid – guru, hal lain yang bisa dicermati dalam rangka mengupayakan kualitas pendidikan adalah rasio guru – sekolah. Rasio guru – sekolah semestinya proporsional dan berseuaian dengan rasio murid – guru. Melihat tabel di atas maka rasio murid – guru dapat ditekan dengan menaikkan rasio guru – sekolah. Sehingga dapat dikatakan, dengan menambah jumlah guru maka dapat mengurangi beban tanggung jawab guru per murid. Meski begitu untuk menambah jumlah guru perlu diperhatikan juga akan kondisi fisik sekolah. Dan untuk menyeimbangkan antara rasio guru – murid dengan rasio guru – sekolah, maka perlu diperhatikan juga jumlah murid yang diterima. Sehingga bisa jadi sistem zonasi tidak akan lagi diterapkan jika rasio guru – sekolah, terlebih rasio guru - murid kurang jauh dari ideal.

Pada jenjang pendidikan PT dapat dilihat bahwa rasio mahasiswa – dosen dan rasio dosen – PT di Kota Surakarta pada Tahun 2022 lebih tinggi daripada Tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlunya dosen yang dibutuhkan di Kota Surakarta untuk mengajar hingga minimal tercapai 1 dosen bertanggungjawab pada 20 mahasiswa.

**Tabel. 3.10. Rasio Mahasiswa - Dosen dan Rasio Dosen - Perguruan Tinggi
Kota Surakarta Tahun 2021 - 2022**

Jenjang Pendidikan	Rasio			
	2021		2022	
	Mahasiswa - Dosen	Dosen - PT	Mahasiswa - Dosen	Dosen - PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PT	23,92	90,93	24,48	104,35

Sumber : Kemenristek, Kemendikbud, & Kemenag Kota Surakarta

Perlu adanya pertimbangan juga bagi PT yang membuka jurusan baru terkait dengan beban dosen mengajar. Solusi jangka pendek untuk mengatasi berlebihnya beban dosen mengajar adalah dengan mendatangkan dosen terbang. Sementara saat ini di era transisi pandemi Covid-19 menuju endemi, sebagian PT menerapkan 50% pembelajaran tatap muka dan 50% pembelajaran daring bahkan ada yang masih menerapkan 100% pembelajaran daring untuk mengurangi kepadatan kehadiran mahasiswa secara fisik selama masa dan jam pembelajaran dilaksanakan.

Angka Putus Sekolah (APtS)

Indikator lain dari melihat kualitas pendidikan adalah ketinggian dari Angka Putus Sekolah (APtS) yang merupakan perbandingan antara jumlah anak yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah anak yang pernah atau sedang bersekolah menurut kelompok usia sekolah. APtS mengindikasikan adanya ketidakmampuan secara ekonomi oleh orang tua anak usia sekolah, kondisi lingkungan sosial yang kurang dan atau bahkan tidak positif terhadap keberlanjutan lama pendidikan anak usia sekolah, serta belum meratanya penyelenggaraan sistem pendidikan di suatu daerah atau wilayah. Tingginya APtS pada suatu wilayah menggambarkan rendahnya kualitas pendidikan masyarakatnya secara rata-rata.

Sepanjang Tahun 2020 - 2021 APtS untuk kelompok umur anak usia sekolah 7 – 15 tahun di Kota Surakarta menggambarkan tidak ada anak sekolah di jenjang pendidikan SD/ sederajat yang putus sekolah. Dan pada Tahun 2021 APtS Kota Surakarta kembali lebih dari 0 karena dampak pandemi sehingga masih ada anak-anak usia sekolah yang membantu mencari bahkan menjadi pencari nafkah utama bagi keluarganya. Hal ini mencerminkan bahwa program wajib belajar 9 tahun di Kota Surakarta pada Tahun 2021 kembali belum berhasil dan tuntas.

Sementara itu masih ada APtS sebesar 24,56% pada anak usia sekolah di kelompok umur 16 – 18 tahun di Kota Surakarta pada Tahun 2021, yang berarti masih ada sebanyak 24 – 25 anak yang putus sekolah dari 100 orang anak yang sedang atau pernah bersekolah pada kelompok umur 16 – 18 tahun. Meskipun begitu, penurunan APtS pada jenjang kelompok umur usia sekolah tersebut patut

diapresiasi karena perlu upaya dari seluruh pihak terkait agar anak-anak tetap terus bisa sekolah dan berupaya menuntaskan wajib belajar 12 tahun.

Tabel. 3.11. Angka Putus Sekolah (APtS) menurut Kelompok Umur Usia Sekolah di Kota Surakarta Tahun 2020 - 2021

Kelompok Umur Usia Sekolah (tahun)	Angka Putus Sekolah (%)	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
7 - 12	0,00	0,00
13 - 15	0,00	0,99
16 - 18	33,75	24,56

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020-2021 (Susenas 2020-2021)

APtS lebih dari 0 menunjukkan bahwa masih perlu adanya perhatian dan berbagai program dari seluruh pihak terkait, selain memberikan biaya sekolah gratis. Masih diperlukan upaya dari pihak sekolah maupun keluarga dan lingkungan untuk memberikan pendampingan dan konseling serta motivasi dan *support* secara kontinyu bagi anak-anak yang mulai menunjukkan gejala atau bahkan berkeinginan untuk tidak menamatkan sekolah pada jenjang pendidikan SLTA/ sederajat.

BAB 4

KETENAGAKERJAAN



Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau produk serta jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat.

Secara ekonomi tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang berperan penting dalam peningkatan jumlah produksi sekaligus sebagai pendorong peningkatan pendapatan nasional. Pendapatan nasional yang berasal dari investasi merupakan hasil tabungan dari masyarakat. Tingginya tingkat investasi pada suatu negara dapat digunakan untuk membuka lapangan kerja baru. Dengan banyaknya lapangan kerja baru akan mampu menyerap tenaga kerja yang berimbas pada kenaikan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi.

Sampai dengan saat ini, BPS menggunakan konsep ketenagakerjaan (*The Labor Force Concept*) yang merujuk pada rekomendasi *International Labour Organization (ILO)*. Konsep ini membagi penduduk menjadi kelompok penduduk usia kerja (minimal berusia 15 tahun) dan kelompok penduduk bukan usia kerja (berusia kurang dari 15 tahun). Selanjutnya penduduk usia kerja dibagi menjadi kelompok angkatan kerja (penduduk yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan) dan kelompok bukan angkatan kerja (penduduk yang sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya). Sementara itu, konsep bekerja dibatasi dengan melakukan kegiatan/aktivitas minimal selama 1 jam secara berturut-turut dalam seminggu kemarin yang ditujukan untuk mendapat atau membantu mencari penghasilan.

Penghitungan terkait dengan ketenagakerjaan berdasarkan konsep bekerja dilakukan oleh BPS dengan melaksanakan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Beberapa indikator yang digunakan untuk menjelaskan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Komposisi Penduduk Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Komposisi Penduduk Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam kerja Selama Seminggu dan Jenis Kelamin, Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Informal Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, serta Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Besarnya jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi terhadap jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas baik yang bekerja ataupun mencari pekerjaan, diukur dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK Kota Surakarta secara umum masih berfluktuatif dan masih kurang dari 70% pada periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022. Sehingga masih ada sebesar 30% lebih angkatan kerja yang sedang sekolah, mengurus rumah tangga, serta melakukan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi dan masih bergantung secara ekonomi sepanjang Tahun 2018 – 2022 di Kota Surakarta khususnya pada Tahun 2020 – 2021 yang terkena dampak dari pandemi Covid-19. Sedikit naiknya TPAK di Kota Surakarta pada Tahun 2022 menggambarkan bahwa mulai tampak upaya pemulihan ekonomi setelah badai pandemi Covid-19 berlangsung meskipun belum bisa menyamai kondisi TPAK pada Tahun 2020.

**Tabel. 4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
di Kota Surakarta
Tahun 2018 - 2022**

Rincian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK (%))	65,62	69,27	68,84	66,89	68,15
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT (%))	4,39	4,16	7,92	7,85	5,83

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional 2018-2022 (Sakernas 2018-2022)

Sementara itu besarnya pengangguran dalam angkatan kerja termuat dalam penghitungan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka adalah penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha beserta dengan yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan berikut juga bagi yang baru mendapat pekerjaan namun belum mulai bekerja. TPT Kota Surakarta yang sempat mengalami kenaikan pada Tahun 2020 karena dampak dari pandemi Covid-19, mengalami penurunan TPT di Tahun 2021 -2022 yang menunjukkan bahwa penduduk Kota Surakarta terus berusaha untuk bangkit dari keterpurukan secara ekonomi akibat pandemi Covid-19 baik secara mandiri maupun bergabung dengan sejumlah usaha yang mulai aktif dan berjalan normal kembali.

Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Besar potensi ekonomi dalam menyerap tenaga kerja dapat dilihat berdasarkan komposisi angkatan kerja di setiap lapangan usaha. Lapangan usaha yang merupakan bidang pekerjaan tempat seseorang berusaha terbagi menjadi 3 kategori yaitu Kategori Pertanian (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan), Kategori Industri (Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Konstruksi), serta Kategori Jasa (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya).

**Tabel. 4.2. Komposisi Penduduk Usia 15 tahun ke atas
yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Kategori Lapangan Usaha
di Kota Surakarta
Tahun 2019 - 2021**

Kategori Lapangan Usaha	Komposisi Penduduk (%)		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	0,47	0,97	1,09
Industri	27,01	29,53	29,39
Jasa	72,52	69,50	69,53

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional 2019-2021 (Sakernas 2019-2021)

Surakarta yang merupakan kota administratif dan memiliki luas wilayah yang tidak lebih besar dari kabupaten di sekelilingnya, tidak menghalangi untuk memiliki aktivitas perekonomian yang tinggi setiap harinya. Sebagai pusat bagi kota-kota satelit di sekelilingnya menyebabkan penyerapan tenaga kerja terbesar di Kota Surakarta berada pada Kategori Lapangan Usaha Jasa.

Rendahnya penyerapan tenaga kerja di Kategori Pertanian karena sudah semakin sempitnya lahan pertanian di Kota Surakarta sehingga aktivitas pertanian yang ada hanya dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat yang seringkali juga dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Sementara itu naiknya persentase penyerapan tenaga kerja di Kategori Industri pada Tahun 2020 – 2021 karena mulai beralihnya buruh/karyawan/pegawai dari Kategori Jasa yang di-PHK ke pengolahan makanan dan minuman (Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Kategori Industri Pengolahan Sub Kategori Industri Makanan dan Minuman serta Sub Kategori Industri

Pengolahan Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional meningkat sebesar selama 2 tahun berturut-turut).

Tabel. 4.3. Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Status Pekerjaan Utama di Kota Surakarta Tahun 2020 - 2021

Status Pekerjaan Utama	Penduduk Usia 15 tahun ke Atas (%)		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri	18,98	18,34	19,79
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	15,99	17,51	15,33
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	3,44	3,15	3,10
Buruh/Karyawan/Pegawai	38,35	34,10	36,53
Pekerja bebas	12,09	12,87	12,43
Pekerja keluarga/tak dibayar	11,14	14,04	12,83

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional 2019-2021 (Sakernas 2019-2021)

Berdasarkan status pekerjaan utama, mayoritas penduduk Kota Surakarta di sepanjang Tahun 2019 - 2021 bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Sementara itu kenaikan dan penurunan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas berfluktuatif sepanjang Tahun 2019 – 2021.

Jumlah Jam Kerja

Jam kerja merupakan periode waktu di mana seseorang melakukan pekerjaan untuk mendapatkan upah tertentu. BPS menggunakan konsep bekerja yang dipahami dengan melakukan kegiatan/aktivitas minimal selama 1 jam secara berturut-turut dalam seminggu kemarin yang ditujukan untuk mendapat atau membantu mencari penghasilan.

Lebih dari 50% penduduk laki-laki di Kota Surakarta memiliki jam kerja lebih dari 41 jam per minggu selama Tahun 2020 - 2021. Persentase terkecil laki-laki yang bekerja berada pada kelompok 1 – 14 jam per minggu, sedangkan persentase terkecil perempuan yang bekerja berada pada kelompok

25 – 34 jam per minggu. Pada Tahun 2021 tampak adanya penurunan persentase pada kelompok jumlah jam kerja ≥ 41 jam selama seminggu baik laki-laki dan perempuan yang mencerminkan dari kepatuhan masyarakat untuk membatasi aktivitas selama masa PPKM dan atau karena adanya peralihan jumlah pekerja menurut kategori lapangan usaha yang menyebabkan berubahnya jumlah jam kerja selama seminggu.

Tabel. 4.4. Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang Bekerja menurut Jumlah Jam kerja Selama Seminggu dan Jenis Kelamin di Kota Surakarta Tahun 2020 - 2021

Kelompok Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu	Jenis Kelamin Penduduk (%)			
	2020		2021	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 - 14 jam	6,14	10,41	8,01	15,09
15 - 24 jam	7,55	8,28	11,51	16,57
25 - 34 jam	9,09	10,13	13,05	14,43
35 - 40 jam	13,00	18,48	14,46	14,81
≥ 41 jam	64,22	52,70	52,96	39,09

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional 2020-2021 (Sakernas 2020-2021)

Secara umum tampak bahwa pada Tahun 2021 jumlah jam kerja perempuan berada pada kisaran 1 – 40 jam selama seminggu. Sementara itu, penurunan persentase pada kelompok laki-laki dengan jumlah jam kerja ≥ 41 jam selama seminggu pada Tahun 2021 diiringi dengan kenaikan persentase kelompok laki-laki dengan jumlah jam kerja pada kisaran 1 – 40 jam selama seminggu. Sehingga dapat dilihat upaya laki-laki untuk tetap dapat bekerja dan berproduksi agar dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga selama masa pandemi Covid-19 berlangsung.

Upah/Gaji/Pendapatan

Upah/gaji/pendapatan merupakan balas jasa yang diberikan kepada pekerja sebagai imbalan atas tenaga, pikiran, dan jasa yang diberikan selama proses memproduksi barang ataupun jasa. Upah/gaji/pendapatan yang diterima dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik dalam bentuk barang maupun jasa. Sedangkan upah/gaji/pendapatan bersih merupakan penghasilan yang diterima pekerja setelah dikurangi biaya-biaya dan potongan-potongan yang digunakan dalam proses produksi dan atau telah disepakati sebelumnya dengan pemberi kerja.

Tabel. 4.5. Rata-rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih per Bulan Pekerja Informal menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Surakarta Tahun 2019 - 2021

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih per Bulan (ribu rupiah)		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Pernah Sekolah/ Belum Tamat SD	1.357,42	1.126,10	1.120,11
SD/MI	1.426,46	1.547,80	961,94
SMP/MTs	1.860,54	1.405,80	1.191,35
SMA ke Atas	2.350,77	2.071,50	1.379,33

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional 2019-2021 (Sakernas 2019-2021)

Secara umum rata-rata upah/gaji/pendapatan bersih per bulan bagi pekerja informal di Kota Surakarta pada Tahun 2021 mengalami penurunan di semua kelompok pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Hal ini dikarenakan adanya PPKM yang berimbas pada jumlah jam kerja pekerja selama sebulan yang menyebabkan upah/gaji/pendapatan yang diterima juga disesuaikan.

Rata-rata upah/gaji/pendapatan bersih per bulan pekerja informal yang pendidikan tertingginya minimal tamat SMA selalu lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya pada Tahun 2019 – 2021. Namun begitu tampak bahwa upah/gaji/pendapatan pekerja informal pada Tahun 2021 yang tamat SD/MI mengalami penurunan dibandingkan pada kondisi Tahun 2020 dan lebih rendah dari upah/gaji/pendapatan pekerja informal yang tidak pernah sekolah/belum tamat SD.

Sementara itu rata-rata upah/gaji/pendapatan pekerja informal dengan pendidikan tidak pernah sekolah/belum tamat SD cenderung lebih stabil selama Tahun 2019 – 2021. Hal ini menunjukkan bahwa pekerja informal yang tidak pernah sekolah/belum tamat SD di Kota Surakarta cenderung lebih diminati oleh para pelaku usaha di Kota Surakarta sampai dengan Tahun 2021.

Berdasarkan kategori lapangan usaha pada Tahun 2019 – 2021 ada penurunan rata-rata upah/gaji/pendapatan bersih per bulan di seluruh kategori yang dialami oleh pekerja informal. Sementara itu ada kenaikan rata-rata upah/gaji/pendapatan bersih bagi para pekerja informal pada Tahun 2021.

Tidak adanya rata-rata upah/gaji/pendapatan bersih bagi pekerja informal di kategori lapangan usaha pertanian pada Tahun 2021 seiring dengan peningkatan rata-rata upah/gaji/pendapatan pekerja formalnya. Meningkatnya rata-rata upah/gaji/pendapatan pekerja formal di kategori lapangan usaha industri pada Tahun 2021 menunjukkan adanya kompensasi yang layak bagi pekerja seiring dengan terus bertambahnya dan meningkatnya produksi serta bertumbuh, berkembang, dan meluasnya pasar

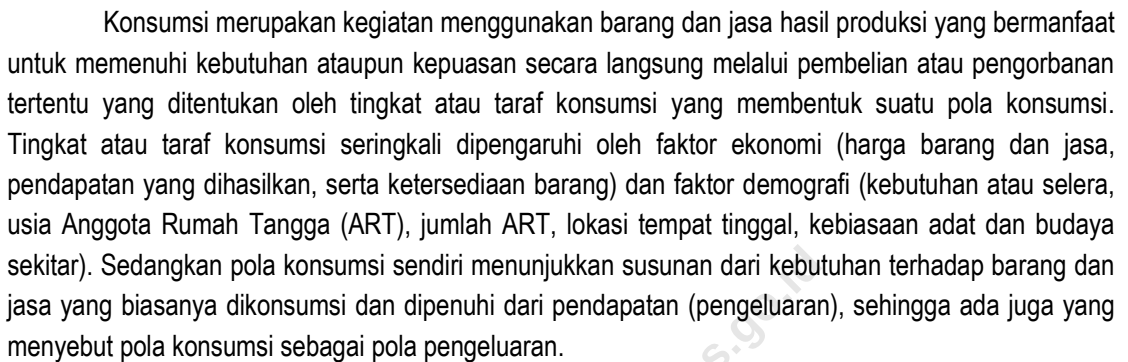
pemasaran bagi hasil produksi dari lapangan usaha kategori industri pengolahan sub kategori industri makanan dan minuman serta sub kategori industri pengolahan kimia, farmasi dan obat tradisional.

**Tabel. 4.6. Rata-rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih per Bulan Pekerja
menurut Lapangan Pekerjaan Utama
di Kota Surakarta
Tahun 2019 - 2021**

Kategori Lapangan Usaha	Rata-Rata Upah/Gaji/Pendapatan Bersih per Bulan (ribu rupiah)					
	2019		2020		2021	
	Formal	Informal	Formal	Informal	Formal	Informal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian	-	1.309,35	1.149,20	544,00	1.268,10	-
Industri	2.068,29	1.410,97	1.980,20	1.192,50	2.141,70	1.197,19
Jasa	2.488,22	2.145,90	1.994,70	1.577,40	2.076,70	1.556,05

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional 2019-2021 (Sakernas 2019-2021)

TARAF DAN POLA KONSUMSI



Cakupan konsumsi di dalam Susenas yaitu konsumsi barang yang meliputi makanan, minuman, dan tembakau (makanan pokok; protein (hewani : ikan, daging, telur, dan susu; nabati : sayur, kacang, dan buah); minyak dan lemak; bahan minuman; bumbu dan rempah-rempah; bahan makanan dan makanan/minuman dalam kemasan; serta makanan/minuman siap saji) dan rokok, tembakau, sirih serta barang bukan/non makanan (perumahan dan fasilitas rumah tangga (air, listrik, dan bahan bakar masak) serta pemeliharaan rutin rumah tangga; transportasi; komunikasi; produk perawatan diri; barang kesehatan; rekreasi, olahraga, dan budaya; pakaian, alas kaki, dan tutup kepala; begitu juga barang tahan lama (furnitur dan barang pecah belah, perhiasan, peralatan elektronik dan instalasi, serta binatang dan tanaman peliharaan)) serta konsumsi jasa yang meliputi jasa kesehatan, jasa pendidikan negeri dan swasta, jasa penginapan/akomodasi, dan jasa lainnya (pajak, pungutan, dan asuransi serta keperluan pesta dan upacara/kenduri). Konsumsi rumah tangga yang dicatat di dalam Susenas telah digunakan untuk penghitungan Produk Domestik Bruto/ Produk Domestik Regional Bruto (PDB/PDRB), menyusun dan menyesuaikan rumusan tarif upah minimum untuk pekerja, penyusunan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan untuk memantau perkembangan pencapaian *Sustainable Developments Goals (SDGs)*.

Pengeluaran Rumah Tangga

Sebagian pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk membiayai pembelian berbagai macam barang dan jasa disebut dengan pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan non makanan.

Tabel. 5.1. Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan menurut Jenis Pengeluaran di Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021

Jenis Pengeluaran	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita per bulan (Rp.)				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Pengeluaran	1.153.562,00	1.537.592,00	1.583.571,00	1.643.842,00	1.603.079,00
Makanan	480.988,00	578.603,00	634.146,00	628.884,00	638.158,00
Non Makanan	672.574,00	958.989,00	949.425,00	1.014.958,00	964.921,00

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017-2021 (Susenas 2017-2021)

Secara rata-rata, total pengeluaran per bulan setiap penduduk di Kota Surakarta mengalami kenaikan dari Tahun 2017 sebesar Rp. 1.153.562,00 sampai menjadi Rp. 1.603.079,00 pada Tahun 2021. Namun hal ini tidak seiring dengan kenaikan pengeluaran pada kelompok makanan maupun kelompok non makanan di setiap tahunnya.

Rata-rata pengeluaran makanan di Kota Surakarta selama Tahun 2017 – 2021 berada pada kisaran Rp. 400.000,00 sampai dengan kurang dari Rp. 700.000,00 per kapita. Sementara itu rata-rata pengeluaran non makanan berada pada kisaran Rp. 600.000,00 sampai dengan kurang dari Rp. 1.100.000,00 per kapita. Berfluktuatifnya pengeluaran pada kelompok makanan maupun non makanan menunjukkan bahwa masyarakat di Kota Surakarta masih mengurangi dan atau bahkan telah mampu mencukupi kebutuhan pada kelompok makanan kemudian baru beralih untuk mencukupi kebutuhan kelompok non makanan.

Sementara itu, persentase pengeluaran kelompok makanan dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang lebih kecil dari pengeluaran kelompok non makanan. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencukupi kebutuhan non makanan di Kota Surakarta membutuhkan lebih banyak biaya dibandingkan untuk mencukupi kebutuhan makanan. Interpretasi lain bisa dikatakan bahwa secara rata-rata, penduduk di Kota Surakarta merupakan masyarakat sejahtera yang pengeluaran kelompok non makanannya selalu lebih tinggi persentasenya dibandingkan dengan pengeluaran kelompok makanan dari tahun ke tahunnya.

Tabel. 5.2. Persentase Pengeluaran per Kapita per Bulan menurut Jenis Pengeluaran di Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021

Jenis Pengeluaran	Persentase Pengeluaran per Kapita per bulan (%)				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Makanan	41,70	37,63	40,05	38,26	39,81
Non Makanan	58,30	62,37	59,95	61,74	60,19

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017-2021 (Susenas 2017-2021)

Dari tabel distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia berikut tampak bahwa pada Tahun 2021 ada penurunan persentase pada kriteria distribusi pengeluaran 20% atas dan 40% bawah yang berimbas pada peningkatan persentase pada kriteria distribusi pengeluaran 40% tengah dibandingkan dengan kondisi pada Tahun 2020. Hal ini bisa ditengarai dengan masih berlangsungnya pandemi Covid-19 pada Tahun 2021 sehingga menyebabkan turunnya tingkat pengeluaran di masyarakat Kota Surakarta ataupun mulai adanya *saving* sebagai tanda mulai adanya perilaku investasi dari masyarakat Kota Surakarta di tahun tersebut. Hal lain adalah upaya pemulihan ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19 belum terlalu mampu menaikkan tingkat pengeluaran masyarakat karena belum stabilnya ekonomi.

Tabel. 5.3. Distribusi Pengeluaran berdasarkan Kriteria Bank Dunia di Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021

Kriteria Bank Dunia	Distribusi Pengeluaran (%)				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

40% bawah	17,26	14,60	18,21	17,23	17,22
40% tengah	40,42	34,95	37,36	34,61	38,03
20% atas	42,32	50,45	44,43	48,16	44,75

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017-2021 (Susenas 2017-2021)

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah tingkat kecukupan gizi. Tingkat kecukupan gizi yang disesuaikan dengan kelompok umur menurut jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan serta aktivitas tubuh setiap hari merupakan rata-rata kecukupan zat gizi yang dapat dihitung sebagai Angka Kecukupan Gizi (AKG).

Tingkat kecukupan gizi mencakup jumlah konsumsi kalori, protein, lemak, karbo, serat, air, vitamin, dan mineral yang disesuaikan dengan banyaknya jenis makanan yang dikonsumsi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor. 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan bagi Bangsa Indonesia, rata-rata kecukupan energi kalori dan protein bagi penduduk Indonesia (tanpa menyesuaikan dengan kelompok umur menurut jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan serta aktivitas tubuh) masing-masing sebesar 2150 kilo kalori dan 57 gram per orang per hari pada tingkat konsumsi.

Tabel. 5.4. Rata-rata Konsumsi Energi dan Protein per Kapita per Hari di Kota Surakarta Tahun 2020 - 2021

Rata-rata Konsumsi	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Energi (Kkal)	2.102,30	1.734,10
Protein (gram)	67,46	51,73

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020-2021 (Susenas 2020-2021)

Secara rata-rata, konsumsi energi penduduk di Kota Surakarta sampai dengan Tahun 2021 masih kurang dari 2150 kilo kalori setiap harinya. Hal ini dikarenakan kebiasaan hidup hemat (irit) dan *tirakat* (menahan keinginan berlebihan sejenak) penduduk yang merupakan warisan adat serta budaya dalam falsafah hidup di Kota Surakarta. Hal lain adalah mayoritas penduduk di Kota Surakarta sudah tidak berada di kategori pertanian lagi meskipun masih banyak yang bekerja sebagai pekerja kasar (kuli gendong di pasar, kuli bangunan, pengayuh becak, dll) yang memerlukan energi lebih.

Sementara itu konsumsi energi dan protein per orang per hari penduduk Kota Surakarta pada Tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi pada Tahun 2020. Angka-angka ini mengindikasikan bahwa secara umum mayoritas penduduk di Kota Surakarta meskipun rata-rata total pengeluaran per kapita pada Tahun 2021 lebih tinggi daripada rata-rata total pengeluaran per kapita pada Tahun 2020, namun kualitas barang yang didapatkan pada Tahun 2021 kurang dari Tahun 2020 sehingga perubahan nilai barang mempengaruhi nilai konsumsi yang didapatkan.

BAB 6

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN



Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman, salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Perumahan telah menjadi tujuan kesebelas dari Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Secara yuridis, perumahan merupakan kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan (UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman). Rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Kondisi suatu rumah dapat dijadikan sebagai indikator dari tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kondisi dari suatu rumah menunjukkan kualitas dari rumah tersebut. Kualitas dari suatu rumah ditunjukkan dari kualitas material penyusun bangunan tempat tinggalnya (jenis atap, dinding, dan lantai terluas yang digunakan, serta rata-rata luas lantai per kapita), fasilitas penunjang (akses air minum, fasilitas buang air besar, dan sumber penerangan), serta status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang dapat juga menunjukkan tingkat perekonomian dari rumah tangga itu sendiri dan masyarakat pada umumnya.

Semakin baik kondisi dan kualitas dari sekelompok rumah menunjukkan bahwa kawasan dan lingkungan tersebut layak huni. Dalam Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas), rumah didekati dengan bangunan tempat tinggal yang memiliki makna dan wujud lebih luas.

Kualitas Bangunan Tempat Tinggal

Kualitas bangunan tempat tinggal diketahui berdasarkan pemilihan jenis atap, dinding, dan lantai terluas yang digunakan. Bangunan tempat tinggal dengan kualitas yang baik menunjukkan kondisi ekonomi yang baik juga.

Pada Tahun 2021, jenis atap terluas yang mayoritas digunakan oleh masyarakat Kota Surakarta adalah genteng (89,47%). Sementara sebesar 3,15% masyarakat Kota Surakarta telah beratapkan beton.

**Tabel. 6.1. Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Atap Terluas
di Kota Surakarta
Tahun 2021**

Jenis Atap Terluas	Rumah Tangga (%)
	(%)
(1)	(2)
Beton	3,15
Genteng	89,47
Seng	3,42
Asbes	3,69
Bambu	0,27
Kayu/sirap	0,00
Jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia	0,00
Lainnya	0,00

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021 (Susenas 2021)

Masih ada sebesar 0,27% masyarakat Kota Surakarta yang jenis atap terluasnya menggunakan bambu. Dan sudah tidak ada masyarakat di Kota Surakarta yang atap terluasnya menggunakan kayu/sirap, jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia, dan lainnya (kaca) sebagai atap terluasnya.

**Tabel. 6.2. Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Dinding Terluas
di Kota Surakarta
Tahun 2020 - 2021**

Jenis Dinding Terluas	Rumah Tangga (%)	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Tembok	94,94	95,76
Plesteran anyaman bambu/kawat	0,72	0,82
Kayu/papan	3,76	3,01
Anyaman bambu	0,14	0,14
Batang kayu	0,14	0,14
Bambu	-	-
Lainnya	0,30	0,14

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020-2021 (Susenas 2020-2021)

Sebesar 95,76% masyarakat di Kota Surakarta telah menggunakan tembok sebagai dinding terluasnya pada Tahun 2021 yang persentasenya meningkat dari 94,94% pada Tahun 2020. Meningkatnya persentase rumah tangga di Kota Surakarta yang menggunakan tembok sebagai jenis dinding terluasnya diikuti dengan kenaikan persentase penggunaan plesteran anyaman bambu/kawat dan diiringi dengan penurunan persentase penggunaan kayu/papan serta lainnya (seng/asbes, dll) sebagai jenis dinding terluasnya. Sementara itu sudah tidak ada masyarakat di Kota Surakarta yang menggunakan bambu sebagai dinding terluasnya.

Selain atap dan dinding terluas yang digunakan, kualitas bangunan tempat tinggal ditentukan oleh jenis lantai terluas. Mayoritas masyarakat Kota Surakarta telah menggunakan lantai bukan tanah yang ditunjukkan dengan persentase pada Tahun 2021 sebesar 99,16%. Sementara itu masih ada sebesar 0,84% masyarakat Kota Surakarta yang belum beralih ke penggunaan lantai terluas bukan tanah.

Tabel. 6.3. Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Lantai Terluas di Kota Surakarta Tahun 2021

Jenis Lantai Terluas	Rumah Tangga (%)
(1)	(2)
Bukan Tanah	99,16
Tanah	0,84

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021 (Susenas 2021)

Salah satu kriteria rumah sehat menurut World Health Organization (WHO) adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per kapita minimal 10 m². Sedangkan salah satu kategori rumah sehat menurut Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI) adalah rumah yang memiliki luas lantai minimum 8 m² per kapita.

Rata-rata luas lantai tempat tinggal masyarakat di Kota Surakarta pada Tahun 2021 adalah sebesar 28,78 m² per kapita yang meningkat dari 25,96 m² per kapita pada Tahun 2020. Mayoritas masyarakat Kota Surakarta pada Tahun 2021 telah memiliki tempat tinggal dengan luas lantai lebih dari 10 m² per kapita. Dan tinggal sebesar 10,66% masyarakat yang memiliki tempat tinggal dengan luas lantai kurang dari 8 m² per kapita. Hal ini berarti menurut standar Kemenkes RI sudah ada sebesar 89,35% masyarakat di Kota Surakarta yang telah memenuhi salah satu kategori dari rumah sehat.

**Tabel. 6.4. Rata-rata dan Persentase Luas Lantai per Kapita
di Kota Surakarta
Tahun 2020 - 2021**

Rincian	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Rata-rata Luas Lantai (m²/kapita)	25,96	28,78
Luas Lantai (%)	100,00	100,00
<8 (m ² /kapita)	14,88	10,66
8 - 9 (m ² /kapita)	7,23	6,15
≥10 (m ² /kapita)	77,89	83,20

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020-2021 (Susenas 2020-2021)

Secara umum meningkatnya persentase kualitas bangunan tidak terlepas dari adanya kesadaran masyarakat untuk bisa hidup lebih layak, bersih, sehat, dan nyaman. Selain itu juga karena adanya bantuan terhadap RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) pada Tahun 2018 dan Tahun 2021 bagi keluarga yang memiliki rumah sendiri dengan atap, lantai, serta dindingnya dianggap sudah tidak layak. Hal lain adalah karena adanya penggusuran hunian dengan pemberian ganti atas kepemilikan bangunan (karena tanah masih milik PT. KAI) pada Tahun 2020 di jelang pembangunan Masjid Raya Sheikh Zayed Surakarta serta pada Tahun 2021 di jelang pembangunan rel layang joglo. Sehingga jumlah dan kawasan hunian padat serta kumuh juga semakin berkurang.

Fasilitas Bangunan Tempat Tinggal

Kelengkapan penunjang fasilitas bangunan tempat tinggal mampu menciptakan kenyamanan di dalam sekaligus dapat menunjukkan kualitas dari bangunan tempat tinggal tersebut. Fasilitas bangunan tempat tinggal meliputi akses air minum, fasilitas buang air besar, dan sumber penerangan.

Air minum yang layak memiliki kriteria tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa; tidak berada dalam suhu tinggi; tidak mengandung mikroorganisme maupun bahan kimia berbahaya; serta memiliki PH antara 6,5 – 8,5. Akses air minum layak dapat menunjang kesehatan masyarakat untuk dapat beraktivitas secara baik dan normal.

**Tabel. 6.5. Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Akses Air Minum
di Kota Surakarta
Tahun 2018 - 2021**

Akses Air Minum	Rumah Tangga (%)			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Layak	83,30	98,04	99,40	99,82
Tak Layak	16,70	1,96	0,60	0,18

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018-2021 (Susenas 2018-2021)

Persentase akses air minum layak di Kota Surakarta mengalami peningkatan dari Tahun 2018 sebesar 83,30% hingga menjadi sebesar 99,82% pada Tahun 2021. Masih ada sebesar 0,18% akses air minum yang tidak layak di Kota Surakarta sampai dengan akhir Tahun 2021 yang patut menjadi perhatian pemerintah sebagai penguasa air untuk dapat digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Fasilitas bangunan tempat tinggal berikutnya adalah tempat buang air besar. Persentase rumah tangga di Kota Surakarta pada Tahun 2021 yang menggunakan tempat buang air besar sendiri meningkat menjadi 77,32% dari 74,37% pada Tahun 2020. Kenaikan persentase penggunaan tempat buang air besar sendiri diikuti dengan persentase penggunaan tempat buang air besar bersama.

**Tabel. 6.6. Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Besar
di Kota Surakarta
Tahun 2020 - 2021**

Fasilitas Tempat Buang Air Besar	Rumah Tangga (%)	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Sendiri	74,37	77,32
Bersama	18,47	13,04
MCK Komunal	7,16	9,64
Umum	0,00	0,00
Tidak Ada	0,00	0,00

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020-2021 (Susenas 2020-2021)

Kenaikan persentase tempat buang air besar dengan menggunakan MCK Komunal pada

Tahun 2021 karena adanya pembangunan MCK komunal di sejumlah titik sehingga rumah tangga yang masih menggunakan tempat buang air besar bersama dengan keluarga lainnya meski beda bangunan rumah, dapat menggunakan MCK komunal dengan lebih nyaman. Sementara itu sudah tidak ada rumah tangga di Kota Surakarta yang menggunakan tempat buang air besar secara umum ataupun tidak menggunakan tempat buang air besar sama sekali.

Keberadaan fasilitas tempat pembuangan akhir tinja yang baik mampu mengurangi pencemaran lingkungan, utamanya terhadap tanah dan sumber air. Berdasarkan fasilitas tempat pembuangan akhir tinja di Kota Surakarta pada Tahun 2021 sebesar 80,65% rumah tangga telah menggunakan tangki septik.

Tabel. 6.7. Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Pembuangan Akhir Tinja di Kota Surakarta Tahun 2021

Fasilitas Tempat Pembuangan Akhir Tinja	Rumah Tangga (%)
(1)	(2)
Tangki Septik	80,65
IPAL	16,57
Kolam/Sawah/Sungai/Danau/Laut	2,35
Lubang Tanah/Pantai/Tanah Lapang/Kebun/Lainnya	0,44

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021 (Susenas 2021)

Masih ada rumah tangga di Kota Surakarta yang fasilitas tempat pembuangan akhir tinjanya di lubang tanah/tanah lapang/kebun/lainnya sebesar 0,44% pada Tahun 2021. Dan masih ada sebesar 2,35% rumah tangga yang fasilitas tempat pembuangan akhir tinjanya di sungai. Hal ini menjadi tugas bersama untuk terus mensosialisasikan dan membiasakan diri hidup bersih dan sehat.

Tabel. 6.8. Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Sumber Penerangan Utama di Kota Surakarta Tahun 2020 - 2021

Sumber Penerangan Utama	Rumah Tangga (%)	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Listrik PLN	99,89	100,00
Listrik Non PLN	0,11	0,00
Bukan Listrik	0,00	0,00

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020-2021 (Susenas 2020-2021)

Berdasarkan sumber penerangan utama di Kota Surakarta pada Tahun 2021, sebesar 100,00% rumah tangga telah menggunakan listrik PLN. Dan sudah tidak ada rumah tangga yang menggunakan bukan listrik sebagai penerangan utamanya. Kenaikan persentase ini karena Kota Surakarta menjadi salah satu pusat distribusi listrik se-Solo Raya.

Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal

Status kepemilikan bangunan tempat tinggal dipengaruhi oleh kondisi ekonomi rumah tangga. Sehingga dapat dikatakan bahwa status kepemilikan bangunan tempat tinggal menunjukkan tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

Sebesar 61,89% rumah tangga di Kota Surakarta pada Tahun 2020 bertempat tinggal di bangunan tempat tinggal milik sendiri dan tidak ada lagi rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah adat (lainnya). Kenaikan persentase tinggal di bangunan tempat tinggal milik sendiri diiringi dengan penurunan persentase tinggal di bangunan kontrak/sewa.

Sementara itu tampak bahwa ada kenaikan persentase pada rumah tangga yang bertempat tinggal secara bebas sewa. Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa rumah tangga di Kota Surakarta yang belum mandiri secara ekonomi dan atau masih bertempat tinggal secara bebas sewa dengan berbagai alasan selain alasan ekonomi (menjaga orang tua/keluarga, menempati titipan rumah saudara, dll) sampai pada Tahun 2021.

Kondisi lain adalah kosongnya rumah tinggal orang tua di Kota Surakarta selama dan setelah masa pandemi sehingga ditempati oleh anak meskipun belum atau tidak diwariskan, sehingga 1 rumah dapat ditinggali oleh beberapa rumah tangga. Selain itu

semakin mahal biaya untuk kontrak/sewa di Kota Surakarta sehingga menyebabkan persentase rumah tangga yang tinggal di bangunan kontrak/sewa semakin berkurang.

Tabel. 6.9. Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal di Kota Surakarta Tahun 2019 - 2021

Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal	Rumah Tangga (%)		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(2)	(3)
Milik Sendiri	55,73	56,82	61,89
Kontrak/Sewa	20,95	19,83	14,59
Bebas Sewa	22,32	23,07	23,52
Dinas	1,00	0,28	0,00
Lainnya	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2019-2021 (Susenas 2019-2021)

Yang lazim dijumpai di Kota Surakarta sepanjang masa pandemi berlangsung adalah dibatasinya hampir seluruh kegiatan utamanya belajar mengajar secara tatap muka atau di luar jaringan (luring) yang menyebabkan tingkat hunian kontrak/sewa menurun drastis. Hal lain yang menyebabkan tingkat hunian kontrak/sewa menurun adalah maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama masa pandemi sehingga jumlah pekerja dari luar Kota Surakarta yang belum memiliki bangunan tempat tinggal milik sendiri di Kota Surakarta juga jauh berkurang.

[illegible]

Kemiskinan di suatu wilayah dapat dijelaskan melalui beberapa indikator antara lain garis kemiskinan (GK), jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin (Po), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs method*). Sehingga kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi).

Penghitungan kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs method*) oleh BPS ditengarai dengan penetapan Garis Kemiskinan (GK). Garis kemiskinan merupakan batas yang digunakan untuk mengelompokkan penduduk berdasarkan rata-rata total pengeluaran makanan dan non makanan per bulan ke dalam kategori miskin dan tidak miskin.

Sementara itu jumlah penduduk miskin (penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan kurang dari garis kemiskinan pada suatu tahun) mengalami penurunan kembali pada Tahun 2022 setelah mengalami kenaikan pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021. Kenaikan jumlah penduduk miskin pada Tahun 2020 dan Tahun 2021, selain disebabkan oleh naiknya nilai garis kemiskinan bisa juga dibaca sebagai dampak dari masih berlangsungnya pandemi Covid-19 sampai dengan awal Tahun 2022 yang berimbas pada aktivitas dan perilaku ekonomi masyarakat Kota Surakarta.

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA SURAKARTA TAHUN 2022 49

penduduk miskin Kota Surakarta sejatinya merupakan penduduk yang berada pada kategori miskin absolut dan rentan miskin.

Ciri penduduk rentan miskin yaitu akan mengikuti kondisi perekonomian secara umum sehingga dapat dikatakan juga bahwa penduduk rentan miskin adalah penduduk yang kondisi perekonomiannya belum stabil. Untuk membantu penduduk rentan miskin maka sebaiknya lebih ditekankan pada program-program yang mendukung produktivitas penduduk secara ekonomi utamanya. Sementara itu penduduk miskin absolut diperlukan lebih dari sekedar program pembangkit produktivitas, namun juga perlu program-program yang sifatnya langsung dapat dimanfaatkan oleh penduduk minimal untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

**Tabel. 7.1. Perkembangan Kemiskinan
di Kota Surakarta Tahun 2018 - 2022**

Perkembangan Kemiskinan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Garis Kemiskinan (Po (Rp./kapita/bulan))	464.063,00	473.516,00	487.445,00	511.216,00	538.441,00
Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	46,99	45,18	47,03	48,78	45,94
Persentase Penduduk Miskin (Po)	9,08	8,70	9,03	9,40	8,84
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,47	1,60	1,50	1,83	1,07
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,35	0,48	0,38	0,54	0,27

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018-2022 (Susenas 2018-2022)

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan yang baik adalah yang semakin mendekati angka 0.

Indeks kedalaman kemiskinan di Kota Surakarta masih berada pada kisaran angka 1 sampai dengan 2 dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlunya keberagaman dan penambahan nilai nominal program-program bantuan yang diterapkan oleh pemerintah, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun begitu, indeks kedalaman kemiskinan Kota Surakarta pada Tahun 2022 menunjukkan nilai indeks yang lebih baik dan kuat dibandingkan dengan indeks kemiskinan pada Tahun 2018. Gambaran upaya kuat dari seluruh pihak terkait dan seluruh lapisan masyarakat untuk

bangkit lebih kuat tercermin dari nilai indeks yang mendekati angka 1 dari tahun sebelumnya yang terus mendekati nilai indeks angka 2.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menggambarkan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan di Kota Surakarta dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 telah menunjukkan angka kurang dari 1 dan terus menuju angka 0. Hal ini menggambarkan bahwa semakin beda tipis pengeluaran antar penduduk miskin yang tetap harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Surakarta pada khususnya untuk dapat terus melanjutkan berbagai program bantuan yang lebih spesifik dan fundamental.

BAB 8

SOSIAL LAINNYA



Kondisi sosial masyarakat merupakan situasi dalam suatu masyarakat yang berhubungan dengan keadaan sosial. Hal-hal yang berkenaan dengan kondisi sosial masyarakat pada suatu daerah selalu menarik untuk ditelaah. Penelaahan kondisi sosial masyarakat dilakukan melalui aspek-aspek sosial yang telah melekat dan menjadi kebutuhan masyarakat secara umum.

Beberapa aspek sosial yang mempengaruhi keadaan sosial dalam suatu masyarakat yaitu aspek hiburan, aspek informasi dan komunikasi, aspek kesehatan, dan aspek keamanan. Dalam Susenas, aspek-aspek sosial yang termuat di dalamnya dan digunakan untuk menggambarkan kondisi sosial masyarakat yaitu penduduk yang melakukan perjalanan wisata, penduduk yang mengakses teknologi informasi dan komunikasi menurut jenis alat komunikasi, penduduk yang menerima pelayanan kesehatan gratis menurut jenis perawatan, serta penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan menurut jenis kejahatan.

Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana/media. Berdasarkan The United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) TIK adalah perangkat teknologi dan sumber daya yang beragam yang digunakan untuk mengirimkan, menyimpan, membuat, berbagi, atau bertukar informasi.

Semakin tingginya intensitas untuk tetap terus berkomunikasi dan mentransfer serta bertukar informasi di era yang semakin “tak terbatas oleh jarak dan waktu” saat ini, maka semakin diperlukannya perangkat media yang berbasis teknologi tinggi dan mutakhir, komplit, terjangkau, dan yang pasti dapat digunakan untuk semakin “memperpendek” jarak dan “mempersingkat” waktu serta mempermudah komunikasi bahkan mentransfer maupun bertukar informasi. Karena potensi jumlah pengguna teknologi yang semakin tinggi dalam upaya untuk bisa berkomunikasi dan memperoleh informasi, maka berbagai vendor yang didukung oleh para investor terus berinovasi dan menciptakan beragam kemudahan bagi masyarakat melalui berbagai aplikasi yang dapat diakses oleh pengguna dengan cepat, mudah, dan murah bahkan gratis.

**Tabel. 8.1. Persentase Penduduk yang Menggunakan Alat Komunikasi dan Informasi
di Kota Surakarta
Tahun 2020 - 2021**

Alat Komunikasi (%)	Persentase Penduduk (%)	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
PC/Desktop	5,86	2,63
Laptop/Note Book	14,50	14,09
Tablet	2,88	0,95
HP/Ponsel	76,71	81,83
Lainnya	0,05	0,50

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020-2021 (Susenas 2020-2021)

Seiring dengan kondisi tersebut, selama berlangsungnya masa pandemi Covid-19, beberapa kebutuhan masyarakat Kota Surakarta semakin bertumpu kepada akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhinya. Berdasarkan data Susenas Tahun 2021, sebesar 81,83% penduduk di Kota Surakarta menggunakan HP/Ponsel sebagai alat untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Persentase ini meningkat dari kondisi pada Tahun 2020 sebesar 76,71%. Peningkatan persentase ini diiringi dengan menurunnya persentase penggunaan PC/Dekstop, Laptop/Note Book, serta Tablet sebagai alat komunikasi. Semakin tingginya persentase penggunaan HP/Ponsel sebagai alat komunikasi mengindikasikan bahwa sifat HP/Ponsel yang lebih fleksibel untuk dibawa kemana saja serta fungsi dari fitur berbagai aplikasi yang semakin lengkap dan mudah bagi pengguna untuk bisa mengakses komunikasi dan informasi, semakin sesuai dengan kebutuhan pengguna terhadap alat komunikasi pada masa kini utamanya pada masa-masa pandemi.

Secara umum, pada Tahun 2021 penduduk di Kota Surakarta menggunakan alat komunikasi dan informasi untuk mengakses Media/Jejaring Sosial diikuti untuk mengakses Informasi/Berita kemudian Hiburan. Sebesar 32,26% dan 29,03% penduduk di Kota Surakarta pada Tahun 2021 meminjam dan atau menyewa alat komunikasi dan informasi untuk dapat mengakses hiburan dan media/jejaring sosial dibandingkan alat komunikasi lainnya.

Tabel. 8.2. Persentase Penduduk yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi menurut Jenis Alat Komunikasi dan Informasi di Kota Surakarta Tahun 2021

Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jenis Alat Komunikasi dan Informasi (%)				
	PC/Desktop	Laptop/Note Book	Tablet	HP/Ponsel	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Informasi/Berita	18,62	17,59	19,67	22,01	19,35
Informasi untuk Proses Pembelajaran	8,28	12,43	4,92	9,70	6,45
Mengirim/Menerima E-mail	13,10	11,11	6,56	5,15	0,00
Media/Jejaring Sosial	20,00	19,58	26,23	27,87	29,03
Pembelian Barang/Jasa	7,59	8,60	8,20	5,07	3,23
Penjualan Barang/Jasa	2,76	1,72	0,00	2,11	6,45
Hiburan	13,45	16,14	31,15	19,61	32,26
Fasilitas Finansial	8,62	5,89	1,64	2,97	0,00
Informasi mengenai Barang/Jasa	7,24	6,08	1,64	4,60	3,23
Lainnya	0,34	0,86	0,00	0,91	0,00

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021 (Susenas 2021)

Perjalanan Wisata

Kebutuhan masyarakat terhadap aspek hiburan seringkali dipenuhi dengan cara bepergian yang dilakukan secara sukarela kurang dari 6 bulan, baik secara perorangan (sendiri) maupun berkelompok (rombongan) untuk mengunjungi objek wisata komersial dan atau menginap di usaha jasa akomodasi komersial dengan jarak perjalanan pulang pergi (PP) minimal 100 km. Persentase penduduk di Kota Surakarta yang bepergian untuk melakukan perjalanan wisata pada Tahun 2021 sebesar 17,16% mengalami penurunan dari kondisi pada Tahun 2020 yang masih melakukan perjalanan wisata sebesar 44,70%. Dari persentase tersebut tampak bahwa ada peningkatan persentase bagi penduduk yang tidak melakukan perjalanan wisata pada Tahun 2021 menjadi sebesar 82,84%. Besarnya persentase penduduk di Kota Surakarta pada Tahun 2021 yang tidak melakukan perjalanan wisata dikarenakan adanya pemberlakuan PPKM serta mulai tingginya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan wisata selama masa pandemi Covid-19 masih berlangsung disebabkan oleh semakin terus bertambahnya kasus Covid-19 di Kota Surakarta.

Tabel. 8.3. Persentase Penduduk yang Melakukan Perjalanan Wisata di Kota Surakarta Tahun 2020 - 2021

Rincian	Persentase Penduduk (%)	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Melakukan Perjalanan Wisata (kali)	44,70	17,16
1	24,13	9,50
2 - 5	18,06	6,62
>5	2,50	1,04
Tidak Melakukan Perjalanan Wisata	55,30	82,84

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020-2021 (Susenas 2020-2021)

Berdasarkan persentase penduduk di Kota Surakarta yang melakukan perjalanan wisata, ada sebesar 16,12% penduduk di Kota Surakarta selama Tahun 2021 yang pernah melakukan perjalanan wisata sebanyak 1 sampai dengan 5 kali. Sedangkan hanya sebesar 1,04% penduduk yang melakukan perjalanan wisata lebih dari 5 kali selama masa PPKM dan penerapan protokol kesehatan serta isolasi untuk mencegah meluasnya penularan Covid-19 di Kota Surakarta.

Tindak Kejahatan

Tindak kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Di dalam Susenas, tindak kejahatan yang dimaksud adalah semua tindakan kejahatan dan pelanggaran yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengenai diri pribadi seseorang dan harta bendanya.

Pencatatan tindak kejahatan di dalam Susenas dilakukan berdasarkan pengakuan dari penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan. Korban kejahatan adalah seseorang yang diri dan atau harta bendanya mengalami atau terkena perilaku atau usaha/percobaan tindak kejahatan selama setahun terakhir.

Pada Tahun 2021 persentase penduduk di Kota Surakarta yang pernah menjadi korban kejahatan terus menurun dari kondisi pada Tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keamanan di Kota Surakarta semakin baik dan semakin terjamin kondusivitasnya meskipun pandemi Covid-19 masih terus berlangsung.

Tabel. 8.4. Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan menurut Jenis Kejahatan di Kota Surakarta Tahun 2020 - 2021

Rincian	Persentase Penduduk (%)	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Pernah Menjadi Korban Kejahatan (kali)	0,93	0,83
Pencurian	0,72	0,61
Penganiayaan	0,00	0,00
Pencurian dengan Kekerasan	0,04	0,00
Pelecehan Seksual	0,04	0,00
Lainnya	0,13	0,22
Tidak Pernah Menjadi Korban Kejahatan	99,07	99,17

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020-2021 (Susenas 2020-2021)

Berdasarkan pengakuan dari para korban kejahatan di Kota Surakarta pada Tahun 2021, mayoritas mengalami kecurian sebesar 0,61% disusul lainnya (ditipu dan dirusak barang-barang) sebesar 0,22%. Tidak ada penduduk yang mengaku pernah menjadi korban kejahatan dari kasus penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, dan pelecehan seksual.

Akses Pengobatan Gratis

Aspek kesehatan masyarakat saat ini menjadi salah satu dari prioritas pemerintah selain aspek pendidikan. Penyelenggaraan pengobatan gratis menjadi tuntutan bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan utamanya bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.

Penyelenggaraan pengobatan gratis di Indonesia diwujudkan dalam jaminan sosial kesehatan. Dalam jaminan sosial kesehatan ada beberapa yang pembayarannya bersifat gratis bagi masyarakat (ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah atau swasta). Jaminan kesehatan telah dapat digunakan baik untuk rawat inap ataupun hanya sekedar untuk rawat jalan.

Secara umum penduduk Kota Surakarta yang mengalami keluhan kesehatan sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari pada Tahun 2021 cenderung lebih seimbang ataupun setara dalam menggunakan jaminan kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk rawat jalan maupun rawat inap dibandingkan dengan kondisi pada Tahun 2020. Sementara BPJS kesehatan Non-PBI/Mandiri cenderung digunakan oleh masyarakat

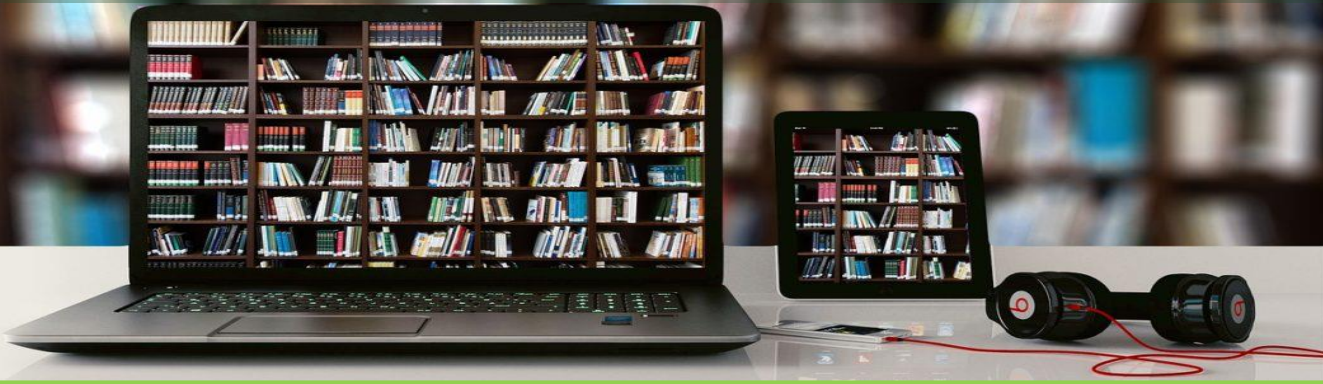
untuk rawat inap. Hal ini bisa mengindikasikan bahwa penduduk yang berasal dari keluarga peserta BPJS Kesehatan PBI cenderung menghindari rawat inap.

Tabel. 8.5. Persentase Penduduk Menggunakan Jaminan Kesehatan menurut Jenis Perawatan di Kota Surakarta Tahun 2020 – 2021

Jaminan Kesehatan	Jenis Perawatan (%)			
	Jalan		Inap	
	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BPJS Kesehatan PBI	59,94	52,63	46,81	52,50
BPJS Kesehatan Non-PBI/Mandiri	37,69	43,42	51,06	41,67
Jamkesda	0,00	0,00	0,00	0,00
Asuransi Swasta	0,89	0,00	1,42	0,00
Perusahaan/Kantor	1,48	3,95	0,71	5,83

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020-2021 (Susenas 2020-2021)

Persentase penggunaan jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan Non-PBI/Mandiri dan dari perusahaan/kantor mengalami peningkatan pada Tahun 2021 seiring dengan penurunan penggunaan jaminan kesehatan asuransi swasta selama masa pandemi Covid-19 berlangsung. Dan sudah tidak ada jamkesda di Kota Surakarta mulai Tahun 2020.



BPS Kota Surakarta, 2021. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Surakarta 2021*. Surakarta : BPS Kota Surakarta

BPS Kota Surakarta, 2021. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Surakarta 2021*. Surakarta : BPS Kota Surakarta

BPS Kota Surakarta, 2022. *Kota Surakarta Dalam Angka 2022*. Surakarta : BPS Kota Surakarta

BPS Kota Surakarta, 2022. *Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Menurut Lapangan Usaha 2017-2021*. Surakarta : BPS Kota Surakarta

BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018. *Statistik Sosial dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Hasil Susenas 2018*. Semarang : BPS Provinsi Jawa Tengah

BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2022*. Semarang : BPS Provinsi Jawa Tengah

BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2022*. Semarang : BPS Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SURAKARTA
Jln. P. Lumban Tobing No. 6, Kel. Setabelan,
Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, 57139
Telp./Fax. (0271) 635428
Email: bps3372@bps.go.id
Website: surakartakota.bps.go.id